

**POLA PENGELUARAN PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh  
Ica Rizki Aneftasari  
1724021009



**PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRACT**

### **PATTERN OF HOUSEHOLD EXPENDITURE OF THE RECIPIENT OF SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM IN BANDAR LAMPUNG CITY**

**By**

**Ica Rizki Aneftasari**

The research aims to know the household income, pattern of household expenditure and the determinant of household expenditure of the recipient of social assistance program in Bandar Lampung City. The study was conducted in Rajabasa Sub Districts and Bumiwaras Sub Districts of Bandar Lampung City. The total samples were 76 recipients of social assistance program, drawn from the population by simple random sampling method. The data were collected in June to August 2020 and analyzed by qualitative and quantitative analysis. The data were analyzed by ordinary least square. This research results showed that the average household income of the recipient of social assistance program in Bandar Lampung City were collected by husband income, wife income, side job, conditional cash transfer assistance and BPNT assistance. The food expenditure Rp13.731.487,00 per year (50,64 percent) was greater than non-food expenditure Rp13.368.059,00 per year (49,36 percent). The determinant of household expenditure of the recipient of social assistance program in Bandar Lampung City were income, the wife's education, and total family member.

Key words: expenditure, income, determinant, social assistance program, the recipient of social assistance program

## **ABSTRAK**

### **POLA PENGELURAN PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Ica Rizki Aneftasari**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan rumah tangga, analisis pola pengeluaran, dan determinan pengeluaran KPM PKH di Kota Bandar Lampung. Penelitian dilakukan di Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Bumiwaras, Kota Bandar Lampung. Total sampel sebanyak 76 KPM PKH, dipilih dari populasi menggunakan metode acak sederhana. Data penelitian diambil pada bulan Juni hingga Agustus 2020 dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Data dianalisis dengan menggunakan analisis statistik dan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga KPM PKH di Kota bandar Lampung berasal dari pendapatan suami, pendapatan istri, pendapatan sampingan, bantuan PKH dan bantuan BPNT. Pengeluaran pangan sebesar Rp13.731.487,00 per tahun (50,64 persen) lebih besar daripada pengeluaran non pangan sebesar Rp13.368.059,00 per tahun (49,36 persen). Determinan pengeluaran rumah tangga KPM PKH di Kota Bandar Lampung adalah pendapatan, pendidikan istri dan jumlah anggota keluarga.

Kata kunci: pengeluaran, pendapatan, determinan, KPM, PKH

**POLA PENGELUARAN RUMAH TANGGA KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Ica Rizki Aneftasari**

**Tesis**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
MAGISTER PERTANIAN**

**pada**

**Program Studi Magister Agribisnis  
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul = **POLA PENGELUARAN PADA KELUARGA  
PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOTA  
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa = **Ica Rizki Aneftasari**

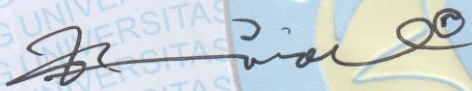
Nomor Pokok Mahasiswa = 1724021009

Program Studi = Magister Agribisnis

Fakultas = Pertanian

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

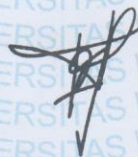


**Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc.**  
NIP.19630827 198603 1 003



**Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.**  
NIP.19640724 198902 1 002

2. Ketua Program Pascasarjana Magister Agribisnis



**Dr. Ir. Dwi Haryono, M.S.**  
NIP.19611225 198703 1 005

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc.**

**Sekretaris : Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.**

**Penguji  
Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Dwi Haryono, M.S.**

**: Dr. Ir. Wuryaningsih Dwi Sayekti, M.S.**

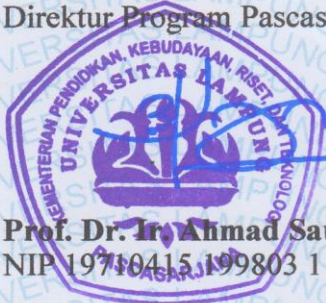
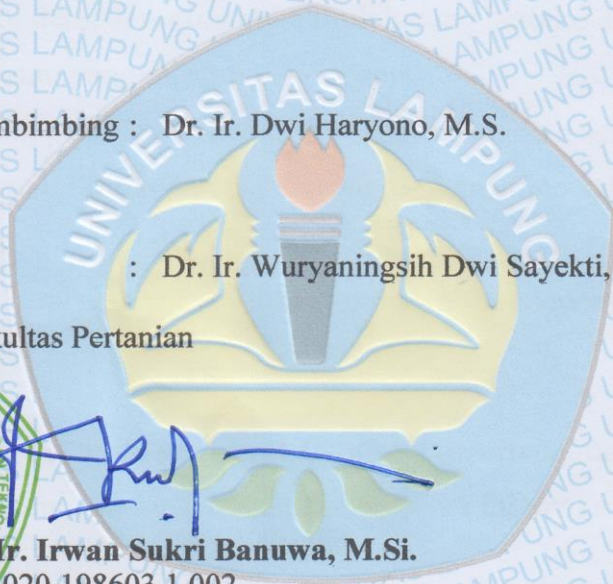
**2. Dekan Fakultas Pertanian**

**Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.**  
NIP. 19611020 198603 1 002

**3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**

**Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**  
NIP. 19710415 199803 1 005

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 2 Agustus 2021**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan judul **“POLA PENGELUARAN PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOTA BANDAR LAMPUNG”** merupakan hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulisan lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Pembimbing penulis tesis berhak mempublikasikan sebagian atau seluruh tesis ini pada jurnal ilmiah dengan mencantumkan nama saya sebagai salah satu penulisnya.
3. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila di kemudian hari terdapat kecurangan dalam karya ini, maka saya siap mempertanggung jawabkannya.

Bandar Lampung, 2 Agustus 2021

Pembuat pernyataan,



Ica Rizki Aneftasari  
NPM 1724021009

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada tanggal 27 Juli 1993. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ir. Taufik Rozali dan Ibunda Dra. Azmawati, M.Pd. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2005 dan pendidikan menengah pertama diselesaikan pada tahun 2008 di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung. Pendidikan lanjutan menengah atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, Penulis diterima pada Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Lampung dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Agribisnis pada Tahun 2016 dengan judul tesis “Determinan Pola Pangan Harapan (PPH) pada Buruh Pengasin Ikan di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung”.

Pada tahun 2017 penulis pernah bekerja sebagai Pendamping pada program Upsus Pajale Kementerian Pertanian di Kabupaten Lampung Timur. Pada tahun 2018 penulis diterima bekerja pada Program PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai Pendamping Sosial PKH Kota Bandar Lampung. Pada Tahun 2017, penulis melanjutkan studi Program Pascasarjana Program Studi Magister Agribisnis Universitas Lampung. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Agribisnis, penulis menyusun tesis dengan judul “Pola Pengeluaran Rumah Tangga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung.



Kepada Ayahanda dan Ibundaku Tersayang

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Alhamdulillahillobbil 'alamin*, puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad *Sallallahu alaihi Wasallam*, yang telah memberikan teladan di setiap kehidupan, kepada keluarga, sahabat, dan penerus risalahnya yang mulia. Penelitian ini berjudul “Pola Pengeluaran pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung”, banyak pihak yang telah memberikan sumbangsih, bantuan, nasihat, serta saran-saran yang membangun, sehingga dalam kesempatan ini, dengan tulus dan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
2. Dr. Ir. Dwi Haryono, M.S., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Agribisnis Fakultas Pertanian dan Dosen Penguji pertama atas ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian tesis.
3. Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc. Dosen Pembimbing pertama atas ketulusan hati, kesabaran, ilmu, bimbingan, masukan, arahan, saran, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama penyelesaian tesis.
4. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing ke dua atas ilmu, bimbingan, masukan, arahan, nasihat, saran dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Ir. Wuryaningsih Dwi Sayekti, M.S., sebagai Dosen Penguji ke dua, atas masukan, motivasi, saran dan arahan yang diberikan untuk menyempurnakan tesis ini.

6. Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A., selaku Pembimbing Akademik, atas arahan dan nasihatnya.
7. Keluarga kecilku tercinta, suamiku M. Galih Ramaputra S. Kom., M.T.I., dan putraku Uwais Taslim yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Orangtuaku tercinta, ayahanda Ir. Taufik Rozali dan ibunda Dra. Azmawati, M.Pd., adik-adik penulis tersayang, Dwi Permatasari S.Pd., Deni Kurniawan dan seluruh keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh staf dan karyawan Jurusan Agribisnis atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswi di Universitas Lampung.
10. Teman-Teman Pendamping Sosial PKH dan UPPKH Kota Bandar Lampung atas semangat dan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
11. Sahabat dan Teman-teman Program Studi Magister Agribisnis, Tunjung Andarwangi, Mbak Sekartiara Syafani, Intan Andya Bellapama, Aji Setia Bakti, Pak Yudiansyah, Mbak Prima Haris, Bang Amanda Putra Seta, Bang Hendri Kurniawan, Riska dan seluruh teman angkatan lainnya, terima kasih atas bantuan, semangat, dan kebersamaannya selama ini dan seluruh pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan, namun semoga karya kecil ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 2 Agustus 2021  
Penulis,

Ica Rizki Aneftasari

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
1. Penduduk bertambah, terjadinya ketimpangan pendapatan .....	4
2. Angka kesejahteraan meningkat, namun masih terdapat permasalahan sosial.....	8
3. Kebutuhan dasar KPM sudah terpenuhi, namun terdapat indikasi bahwa dana bantuan PKH digunakan KPM untuk kebutuhan lainnya .....	10
C. Tujuan .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
<b>II. LANDASAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	13
1. Pengeluaran Rumah Tangga.....	13
2. Pendapatan Rumah Tangga .....	16
3. Teori Kemiskinan .....	17
4. Program Keluarga Harapan .....	22
B. Telaah Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Pemikiran .....	42
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	46
B. Konsep Dasar dan Batasan Operasional .....	46
C. Lokasi Penelitian, Responden dan Waktu Penelitian .....	49
D. Jenis dan Metode Pengumpulan Data.....	51
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	52
1. Pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH .....	53
2. Analisis Pengeluaran Rumah Tangga KPM PKH.....	54
3. Determinan pengeluaran .....	56

<b>IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b>	
A. Keadaan Umum Kota Bandar Lampung .....	67
B. Keadaan Umum Kecamatan Rajabasa.....	69
C. Keadaan Umum Kecamatan Bumiwaras .....	70
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Keadaan Umum Responden.....	72
1. Umur Responden .....	72
2. Tingkat Pendidikan Formal.....	73
3. Pekerjaan KPM PKH .....	74
4. Suku .....	74
5. Lama Pengalaman Bekerja.....	75
6. Jumlah anggota keluarga.....	76
B. Pendapatan Rumah Tangga KPM PKH.....	76
C. Pengeluaran Rumah Tangga KPM PKH di Kota Bandar Lampung	79
D. Pengetahuan KPM pada Kegiatan FDS/P2K2 .....	88
E. Determinan Pengeluaran KPM PKH .....	91
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>106</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Lampung, 2013-2020 .....	3
2. Kewajiban anggota KPM PKH berdasarkan kriteria komponen .....	24
3. Ketentuan penangguhan atau penghentian .....	25
4. Telaah penelitian terdahulu .....	34
5. Data banyaknya penyandang kesejahteraan sosial (fakir miskin) menurut kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2018.....	50
6. Hasil uji validitas dan reliabilitas pengetahuan KPM pada kegiatan FDS/P2K2.....	60
7. Hasil akhir uji validitas dan reliabilitas pengetahuan gizi.....	61
8. Nama ibukota kecamatan dan jumlah kelurahan di Kota Bandar Lampung Tahun 2018. ....	68
9. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung menurut kecamatan, jenis kelamin, dan sex ratio Tahun 2018.....	69
10. Jumlah penduduk menurut kelurahan, jenis kelamin dan sex ratio di Kecamatan Rajabasa Tahun 2017 .....	70
11. Jumlah penduduk menurut kelurahan, jenis kelamin dan sex ratio di Kecamatan Bumiwaras Tahun 2017 .....	71
12. Sebaran KPM PKH menurut umur di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 .....	72
13. Sebaran KPM PKH berdasarkan tahun sukses tingkat pendidikan formal di Kota Bandar Lampung Tahun 2020.....	73

Tabel	Halaman
14. Sebaran KPM PKH menurut suku di Kota Bandar Lampung .....	75
15. Sebaran KPM PKH menurut lama pengalaman bekerja di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 .....	75
16. Sebaran KPM PKH berdasarkan jumlah anggota keluarga di Kota Bandar Lampung Tahun 2020.....	76
17. Gambaran responden berdasarkan tingkat pendapatannya .....	77
18. Rincian pengeluaran pangan dan non pangan rumah tangga KPM PKH di Kota Bandar Lampung per tahun (Rp/tahun). .....	79
19. Sebaran KPM PKH di Kota Bandar Lampung berdasarkan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung indikator BPS (2020).....	81
20. Sebaran jawaban berdasarkan pertanyaan pengetahuan KPM tentang kegiatan FDS/P2K2 .....	89
21. Hasil estimasi pengeluaran rumah tangga KPM PKH Kota Bandar Lampung.....	91
22. Identitas responden .....	107
23. Pendapatan suami.....	109
24. Pendapatan istri.....	111
25. Rata-rata pendapatan rumah tangga KPM PKH di Kota Bandar Lampung.....	113
26. Total pengeluaran pangan KPM PKH di Kota Bandar Lampung .....	116
27. Total pengeluaran non pangan KPM PKH di Kota Bandar Lampung.....	130
28. Rata-rata rekapulasi pengeluaran rumah tangga KPM PKH .....	138
29. Garis kemiskinan menurut BPS.....	140
30. Rata-rata pengeluaran penduduk miskin (Rp/kapita/bulan) Provinsi Lampung menurut BPS 2020 .....	142
31. Rata-rata pengeluaran penduduk miskin (Rp/kapita/bulan) Kota Bandar Lampung menurut BPS 2019 .....	143

Tabel	Halaman
32. Butir pertanyaan pengetahuan KPM tentang kegiatan FDS/P2K2 serta hasil uji validitas dan reliabilitas .....	146
33. Uji validitas dan reliabilitas variabel pengetahuan kegiatan FDS/P2K2.....	147
34. Pengetahuan KPM tentang FDS/P2K2 (MSI) .....	150
35. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran KPM PKH di Kota Bandar Lampung.....	151
36. Uji asumsi klasik dan hasil regresi faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga KPM PKH di Kota Bandar Lampung ....	153
37. Uji normalitas .....	157
38. Uji heteroskedastis .....	158



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagian populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Negara ASEAN.....	2
2. Persentase penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020.....	4
3. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2014-2020.....	5
4. Data kemiskinan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2020.....	6
5. Ratio gini Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2020.....	8
6. Indeks pembangunan manusia Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2020.....	9
7. Komponen KPM PKH .....	23
8. Mekanisme pelaksanaan PKH .....	28
9. Modul P2K2 atau FDS .....	31
10. Alur pemikiran pola pengeluaran KPM PKH di Kota Bandar Lampung.....	44
11. Berbagai sumber pendapatan rumah tangga KPM PKH di Kota Bandar Lampung .....	78
12. Sebaran KPM PKH di Kota Bandar Lampung berdasarkan garis kemiskinan Kota Bandar Lampung indikator BPS (2019).....	81
13. Persentase rata-rata pengeluaran rumah tangga KPM PKH di Kota Bandar Lampung.....	83
14. Persentase pengeluaran pangan KPM PKH di Kota Bandar Lampung.....	84

Gambar	Halaman
15. Persentase pengeluaran non-pangan KPM PKH di Kota Bandar Lampung.....	87
16. Peta Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung.....	159

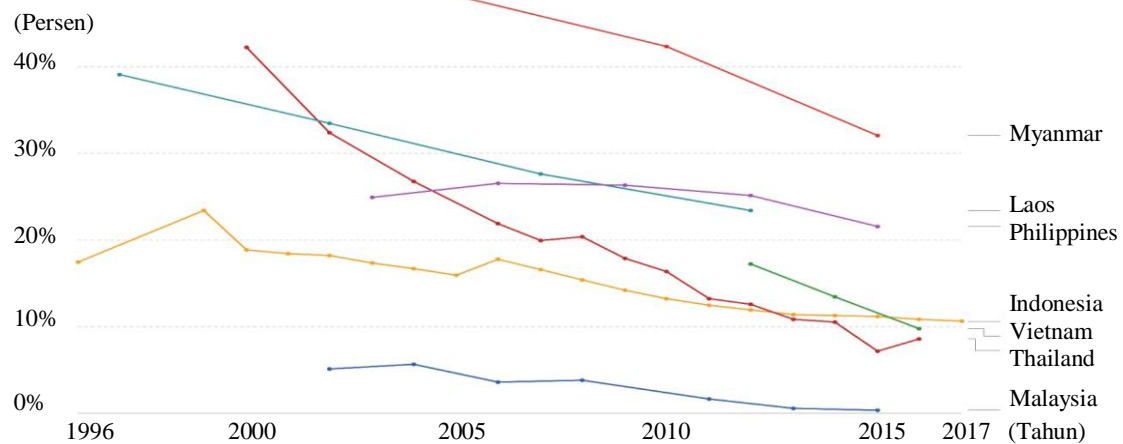
## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berakhirnya *Millenium Development Goals* (MGDs) pada tahun 2015 menyisakan beberapa bagian yang harus dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang akan dilaksanakan hingga tahun 2030. Target yang menjadi fokus utama SDGs untuk dicapai adalah tingkat kemiskinan nasional. Kemiskinan menjadi perhatian utama dan masalah serius yang dihadapi bagi seluruh penduduk dunia, termasuk bagi Negara ASEAN.

Proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan secara nasional dari tahun 1996-2017 untuk Negara ASEAN, khususnya untuk Negara Indonesia mengalami perubahan yang positif. Perubahan yang terjadi yaitu menurunnya jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1, bahwa pada tahun 2011 proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yaitu sebesar 12,49 persen, dan selalu menurun sehingga pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 menjadi sebesar 10,6 persen.

Hal ini mengindikasikan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini telah berada di jalur yang benar, meskipun target yang ingin dicapai SDGs belum terpenuhi. Meskipun program pengentasan kemiskinan pemerintah telah sesuai, namun kondisi seperti ini akan berdampak pada aspek pendidikan dan kesehatan. Keluarga miskin tidak berdaya untuk keluar dari kemiskinan. Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan membutuhkan intervensi dari pihak lain seperti pemerintah untuk dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional tahun 1996-2017 di negara ASEAN dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagian populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Negara ASEAN  
Sumber: World Bank, 2018

Salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintahan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini adalah berupa pemberian bantuan dan perlindungan sosial kepada penerima PKH atau disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah berharap kebijakan pada program ini dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya melalui pemberian dana dengan cara bantuan tunai melalui persyaratan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Program ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam proses pelebagaan perlindungan sosial dan kesejahteraan untuk rumah tangga sangat miskin. Selain dari hal tersebut, PKH diharapkan mampu membawa perubahan untuk masyarakat miskin menjadi mampu perekonomiannya.

Pemerintah sejak tahun 2007 telah melaksanakan PKH. Program ini bertujuan untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan bagi peserta PKH atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Peserta PKH atau KPM merupakan keluarga sangat miskin yang diwakili ibu atau pengurus dalam keluarga. Menurut Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (2013), tujuan khusus dari PKH adalah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan akses kesehatan dan pendidikan. Hal ini berarti penerima PKH dapat menggunakan bantuan tersebut untuk menyekolahkan anak mereka dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak.

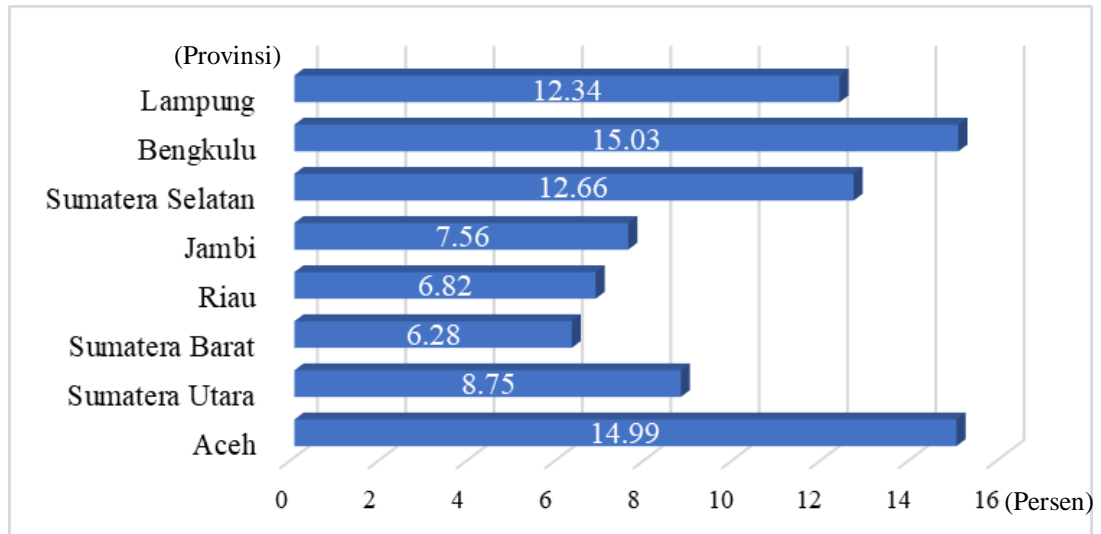
Penanggulangan kemiskinan tentunya harus menjadi sorotan utama bagi pemerintah, mengingat di Indonesia sendiri masih banyak terdapat masyarakat miskin. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Badan Pusat Statistik (2021) diperoleh bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia per Bulan Maret Tahun 2021 mencapai 10,19 persen. Angka tersebut masih lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2020 yang berada di 12,34 persen. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung pada tahun 2013-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Lampung, 2013-2020

<b>Tahun</b>	<b>Garis kemiskinan</b>	<b>Jumlah penduduk miskin</b>	<b>Persentase penduduk miskin</b>
<b>(Bulan Maret)</b>	<b>(Rp/Kap/Bln)</b>	<b>(000 jiwa)</b>	<b>(%)</b>
2013	276.759	1.175	14,86
2014	306.600	1.143	14,28
2015	337.996	1.163	14,35
2016	364.922	1.169	14,29
2017	384.882	1.132	13,69
2018	402.307	1.097	13,14
2019	434.675	1.063	12,62
2020	453.733	1.049	12,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2021)

Berdasarkan hasil survei terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, angka kemiskinan Provinsi Lampung pada tahun 2020 mengalami penurunan. Angka kemiskinan Lampung tahun 2020 sebesar 12,34 persen atau sebanyak 1.049 ribu jiwa. Angka kemiskinan Provinsi Lampung pada tahun 2019 meskipun telah menurun dari tahun sebelumnya masih terbilang tinggi yaitu sebesar 12,62 persen atau 1.063ribu jiwa. Angka kemiskinan Provinsi Lampung pada tahun 2018 juga menurun dari tahun sebelumnya, namun masih terbilang tinggi yaitu sebesar 13,14 persen atau 1.097 ribu jiwa, dengan kata lain selama periode tahun 2013-2020 telah terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin, namun garis kemiskinan bertambah. Gambar 2 menunjukkan persentase grafik penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sumatera tahun 2020.



Gambar 2. Persentase penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

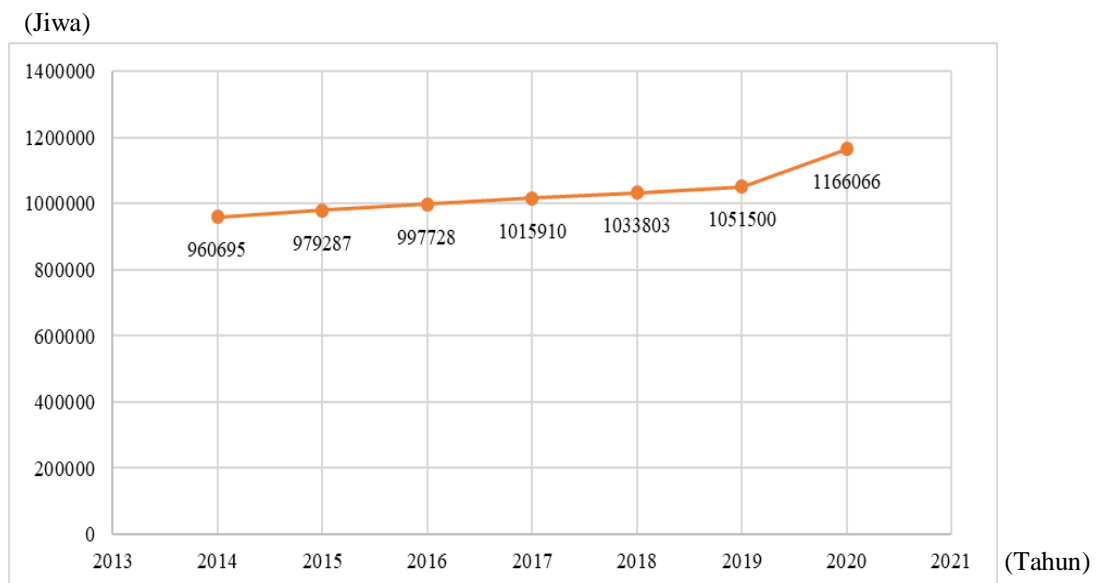
Pada Gambar 2 terlihat bahwa Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki penduduk termiskin keempat setelah Provinsi Aceh, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar 12,34 persen. Kenaikan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung lebih signifikan terjadi pada daerah perkotaan yang bertambah sebesar 0,10 persen, sedangkan untuk daerah pedesaan mengalami penurunan sebesar 0,44 persen (BPS, 2021). Kehidupan pada daerah perkotaan seakan menjamin kehidupan yang menjanjikan bagi setiap urban yang menginginkan keadaan hidup glamour, bermewah-mewahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai, bermacam-macam bentuk bangunan megah dan gaya hidup masyarakat modern.

## B. Rumusan Masalah

### 1. Penduduk bertambah, terjadinya ketimpangan pendapatan

Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa kehidupan di perkotaan lebih menjanjikan daripada di pedesaan, mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan ataupun mengadu nasib di daerah perkotaan. Persepsi tersebut seperti penelitian Tjiptoherijanto (1999), membahas bahwa salah satu penyebab

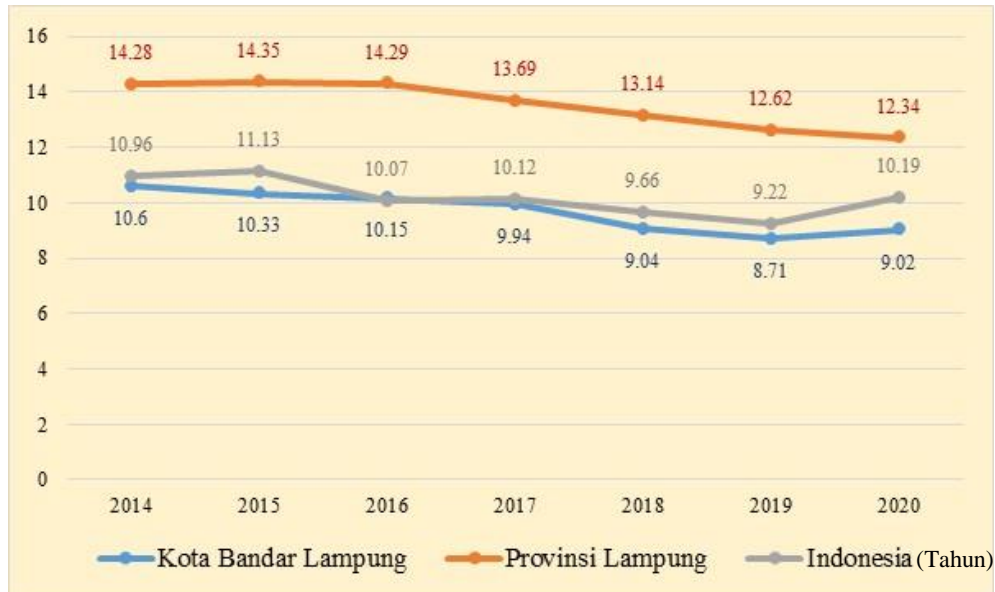
urbanisasi di perkotaan sangat pesat dan akan membentuk koridor koridor perkotaan yang memberikan gap antara kehidupan kota (*urban*) dan kehidupan desa (*rural*), sehingga pertumbuhan masyarakat yang meningkat akan berpusat di daerah perkotaan. Jumlah penduduk yang meningkat juga terjadi di Kota Bandar Lampung dan dapat dilihat pada Gambar 3 tentang jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2014-2020.



Gambar 3. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2014-2020  
Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Pada Gambar 3, berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (2021), dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk di kota Bandar Lampung setiap tahunnya. Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan penduduk di Kota Bandar Lampung adalah urbanisasi. Urbanisasi dapat menjadi masalah baru bagi pemerintah daerah apabila bertambahnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan bertambahnya taraf hidup masyarakat sehingga dapat menjadi penyebab kemiskinan. Gambar 4 yaitu perbandingan tingkat kemiskinan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2020.

(Persen)



Gambar 4. Data kemiskinan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan Gambar 4, persentase kemiskinan Tahun 2020 Kota Bandar Lampung (9,02 persen) berada di bawah Provinsi Lampung (12,34 persen) dan Indonesia (10,19 persen). Meskipun terjadi penurunan persentase kemiskinan setiap tahunnya di Kota Bandar Lampung, terjadi perubahan yang paling signifikan di tahun 2019 ke 2020 yaitu terjadi kenaikan sebesar 0,31 persen. Kota Bandar Lampung belum mampu menanggulangi kemiskinan secara global dikarenakan permasalahan kemiskinan terpusat pada pola pikir masyarakat bahwa semua sisi kehidupan kota seolah memberi kesan kemakmuran hidup.

Pada studi yang dilakukan Syah (2013) menemukan bahwa di sisi lain kehidupan kota yang menunjukkan kemajuan terdapat keterbelakangan yang mencerminkan potret ketidakberdayaan, kemiskinan yang terkonsentrasi pada pemukiman kumuh. Masyarakat desa yang berurbanisasi sebenarnya menyadari tentang adanya perbedaan sistem nilai masyarakat desa yang berasas kekeluargaan sedangkan masyarakat kota cenderung individual dan kompetitif, namun masyarakat desa yang berurbanisasi berupaya menemukan mekanisme penyesuaian diri agar bertahan hidup dan bersaing di kehidupan

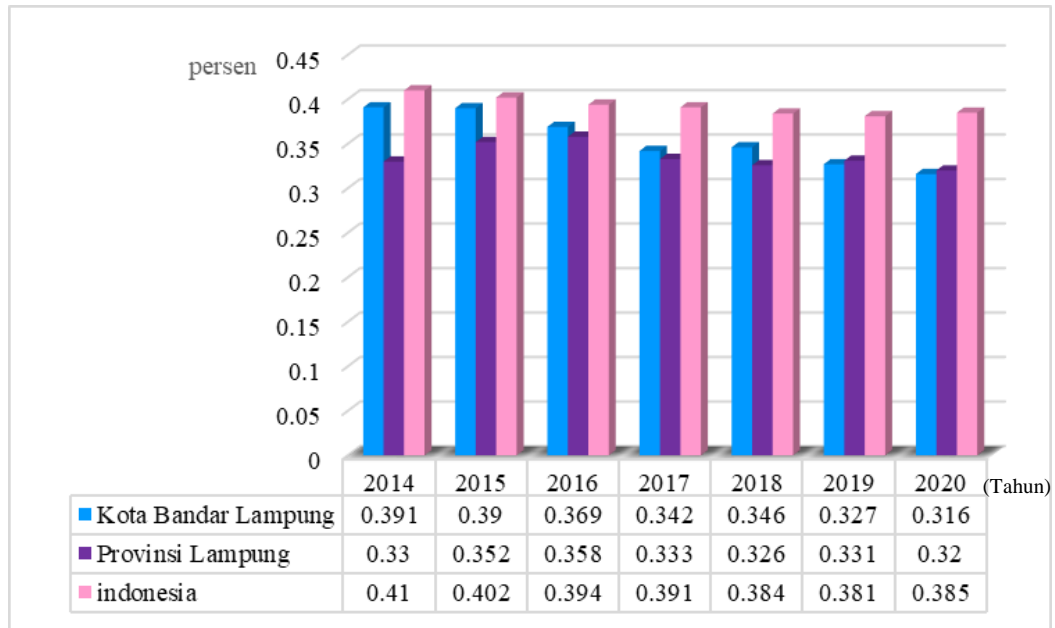


kota yang kompetitif. Inilah permasalahannya, sehingga kemiskinan masyarakat di perkotaan merupakan realitas sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait.

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan menjadi persoalan ekonomi di Kota Bandar Lampung yang paling mendasar yang selalu menjadi pusat perhatian karena sulit terpecahkan. Bahkan hal ini menjadi beberapa pusat perhatian bagi daerah-daerah di Indonesia. Sebagian besar permasalahan penduduk ini disebabkan karena kurangnya pendapatan yang diterima dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Rochman (2013), ada tiga perspektif dalam melihat ketimpangan. Pertama, sebagai gambaran distribusi hasil pembangunan. Dari angka ketimpangan terlihat berapa persen penduduk dalam strata pendapatan atas, menengah, dan rendah menguasai aset dalam pembangunan. Kedua, ketimpangan dilihat pada konteks yang berkaitan antara sektor ekonomi pada basis ekonomi tingkat kelas menengah atas dengan kegiatan ekonomi pada rakyat lemah. Ketiga, melihat ketimpangan dari karakter pelayanan publik dikarenakan muncul pelayanan publik yang buruk, bagi kalangan bawah seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dan air bersih.

Ketimpangan pendapatan pada suatu daerah dapat dilihat dengan menggunakan gini ratio. Menurut Badan Pusat Statistik (2021), gini ratio di Kota Bandar Lampung pada tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 sebesar 0,391 persen dan turun menjadi 0,390 persen pada tahun 2015, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,369 persen dan pada tahun 2017 sebesar 0,342 persen. Gini ratio Provinsi Lampung mengalami fluktuasi dan gini ratio di Indonesia cenderung menurun. Berdasarkan Gambar dari penjabaran tersebut dapat dilihat pada Gambar 5 tentang ratio gini Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2020.



Gambar 5. Ratio gini Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

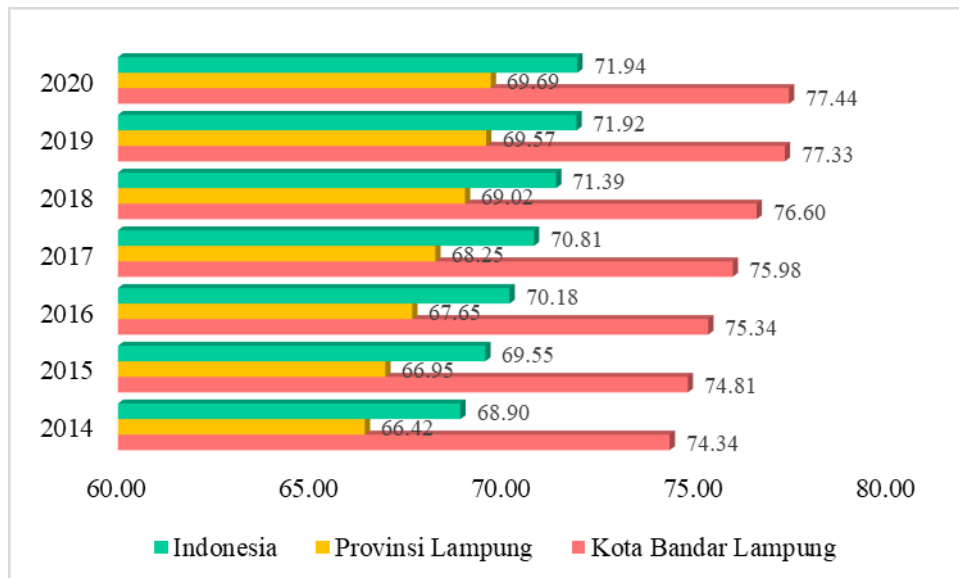
Berdasarkan penjabaran di atas, meskipun kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, namun angka tersebut dapat dikatakan masih jauh dari kata baik dan masih terdapat ketimpangan pendapatan di Kota Bandar Lampung. Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, menyebabkan diperlukannya penanganan serius oleh lembaga pemerintah karena salah satu peran kelembagaan dalam perekonomian untuk mengatasi masalah kemiskinan dan menciptakan pemerataan pendapatan.

## 2. Angka kesejahteraan meningkat, namun masih terdapat permasalahan sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur sederhana untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka rata-rata dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks kemampuan daya beli masyarakat (BPS, 2021). Nilai IPM Provinsi Lampung semakin besar yaitu sejak Tahun

2014 sampai Tahun 2020 yang dapat dilihat pada Gambar 6. Kondisi ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Lampung semakin baik.

IPM Provinsi Lampung yang telah dicapai pada Tahun 2020 yaitu sebesar 69,69. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,12 poin dari Tahun 2019 yang mencapai 69,57 poin. Secara rinci nilai tersebut merupakan kontribusi dari komponen pembentuknya, terdiri dari angka harapan hidup (70,65 tahun), harapan lama sekolah (12,65 persen), rata-rata lama sekolah (8,05 tahun) dan kemampuan daya beli masyarakat sebesar Rp9,892 juta per kapita/tahun.



Gambar 6. Indeks pembangunan manusia Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2014-2020

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Susenas 2014-2020

Jika dibandingkan dengan IPM Indonesia dan IPM Provinsi Lampung, maka IPM Kota Bandar Lampung lebih tinggi dan dapat dibuktikan pada Gambar 6. Kondisi ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kota Bandar Lampung semakin baik pada tahun 2014 hingga 2020 terjadi peningkatan. IPM Kota Bandar Lampung yang telah dicapai pada Tahun 2020 yaitu 77,44 poin. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,11 poin dari Tahun 2019 yang mencapai 77,33 poin.

Berdasarkan data tersebut, kondisi kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung semakin meningkat, sayangnya tidak diimbangi dengan menurunnya angka permasalahan sosial. BPS mencatat bahwa pada Tahun 2017 jumlah permasalahan sosial di Kota Bandar Lampung relatif tinggi. Berdasarkan beberapa kasus permasalahan sosial, jumlah yang paling tinggi di Kota Bandar Lampung adalah jumlah fakir miskin (100,5 ribu jiwa).

Pada penjabaran sebelumnya, dengan adanya ketimpangan, namun di sisi lain kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung meningkat tetapi terdapat permasalahan sosial. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam rangka penuntasan permasalahan sosial pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Asal usul dari program ini adalah pengembangan sistem perlindungan sosial yang dikhususkan untuk keluarga sangat miskin (UPPKH Pusat, 2007). Selain itu, program ini dikeluarkan dengan harapan bisa meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat miskin terutama dalam segi pendidikan melalui wajib belajar serta kesehatan ibu dan anak.

Harapannya, Program PKH dapat mengurangi angka serta memutus rantai kemiskinan pada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah perilaku kelompok masyarakat paling miskin untuk peningkatan kesejahteraan. Pada jangka pendek tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi beban rumah tangga sangat miskin dan untuk jangka panjang agar dapat memutuskan rantai kemiskinan lintas generasi, sehingga generasi selanjutnya dapat keluar dari jerat kemiskinan.

### **3. Kebutuhan dasar KPM sudah terpenuhi, namun terdapat indikasi bahwa dana bantuan PKH digunakan KPM untuk kebutuhan lainnya**

Tingkat kemiskinan rumah tangga dapat digambarkan dengan pendapatan dan pola pengeluarannya. Pendapatan rendah pada masyarakat menyebabkan daya beli juga rendah sehingga masyarakat miskin melakukan dua pilihan dalam membelanjakan uangnya atau bahkan kemungkinan mereka harus meniadakan beberapa kebutuhan dasar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Pola pengeluaran rumah tangga umumnya dibedakan atas pengeluaran pangan dan

pengeluaran non pangan. Rumah tangga yang memiliki pola pengeluaran lebih besar pada pangan mengindikasikan rumah tangga tersebut merupakan rumah tangga miskin (Triana, 2011).

Tujuan pokok PKH tidak hanya meningkatkan peran aktif dan komitmen peserta PKH atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi juga secara ekonomis menjadi sebuah harapan dan terobosan pencapaian tingkat perbaikan pada taraf hidup peserta PKH itu sendiri. Pada pencapaian tujuan PKH tersebut, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang, namun terdapat beberapa bantuan komplementaritas lainnya. Bantuan pemerintah untuk keluarga pra sejahtera pada program PKH berupa dana bantuan PKH dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Namun meskipun kebutuhan dasar KPM sudah terpenuhi oleh bantuan PKH, Program BPNT, Program Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) terdapat indikasi bahwa dana bantuan digunakan untuk keperluan lainnya selain untuk kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan. Hal ini dikarenakan kebutuhan dasar KPM telah terpenuhi oleh pemerintah.

Hal ini didukung oleh pendapat Hikmat (2017), secara nyata PKH memang berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga sangat miskin, namun masih belum optimal. PKH belum sampai pada tahap mengubah pola pikir rumah tangga terhadap masa depan serta meningkatkan etos kerja dengan pendidikan keluarga. Berdasarkan uraian sebelumnya, terindikasi bahwa kebutuhan akan kebutuhan dasar pangan KPM PKH sudah terpenuhi dari bantuan pemerintah melalui program BPNT, kebutuhan akan pendidikan terpenuhi dengan program KIP dan kebutuhan akan kesehatan terpenuhi dengan program KIS, sehingga lebih lanjut pada penelitian ini akan membahas pola pengeluaran, faktor apa saja yang mempengaruhi pengeluaran KPM PKH di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- (1) Bagaimana pendapatan KPM PKH di Kota Bandar Lampung?

- (2) Bagaimanakah pola pengeluaran rumah tangga KPM PKH di Kota Bandar Lampung?
- (3) Bagaimanakah determinan pengeluaran KPM PKH di Kota Bandar Lampung?

### **C. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Mengetahui pendapatan KPM PKH di Kota Bandar Lampung.
- (2) Menganalisis pola pengeluaran KPM PKH di Kota Bandar Lampung.
- (3) Menganalisis determinan pengeluaran KPM PKH di Kota Bandar Lampung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Sebagai rujukan bagi pengambilan keputusan di masa yang akan datang pada yang berwenang seperti dinas sosial, kementerian sosial dan instansi atau lembaga pemerintah yang terkait dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan khususnya pada Program Keluarga Harapan (PKH).
- (2) Sebagai dasar referensi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai bidang yang sejenis.

## II. LANDASAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengeluaran Rumah Tangga

Menurut Triana (2011), yang dimaksud dengan pola pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran yang secara umum terbagi menjadi dua yaitu terdiri atas pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Pola pengeluaran yang lebih condong untuk pangan bagi suatu rumah tangga mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut merupakan rumah tangga miskin. Adapun menurut Handewi, Rachman dan Supriyati (2004), pola pengeluaran pangan rumah tangga adalah salah satu faktor yang menjadi penentu tingkat kesejahteraan dan kecerdasan serta produktivitas rumah tangga.

Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk yaitu pengeluaran rumah tangga. Tingkat pengeluaran terdiri atas dua kelompok, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Tingkat kebutuhan atau permintaan (*demand*) pada intinya berbeda-beda untuk kedua kelompok tersebut (pangan dan non pangan). Kebutuhan akan pangan diutamakan pada kondisi pendapatan yang terbatas, sehingga kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah akan mengalokasikan pendapatannya untuk membeli makanan. Bersamaan dengan pendapatan yang meningkat, maka akan terjadi pergeseran pada pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pengeluaran terutama untuk makanan dan peningkatan pola pengeluaran yang dibelanjakan untuk kebutuhan selain makanan (BKP, 2014).

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) pengeluaran rumah tangga dapat dibedakan untuk pengeluaran konsumsi makanan dan pengeluaran konsumsi non makanan. Pergeseran komposisi dan pola pengeluaran dapat terjadi disebabkan oleh elastisitas pendapatan untuk makanan secara umum rendah, sedangkan elastisitas terhadap kebutuhan bukan makanan relatif tinggi. Keadaan tersebut dapat terlihat dengan jelas pada pada tingkat konsumsi makan sekelompok penduduk yang sudah mencapai titik jenuh, sehingga pada peningkatan pendapatannya mereka gunakan untuk pemenuhan kebutuhan barang bukan makanan, dan sisa pendapatannya dapat ditabung sebagai simpanan (*saving*) atau diinvestasikan.

Lebih lanjut Badan Pusat Statistik (2015) juga mendefinisikan bahwa pola konsumsi rumah tangga sebagai proporsi pengeluaran yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan pangan dan non pangan bagi rumah tangga. Pola konsumsi rumah tangga adalah salah satu indikator kesejahteraan pada rumah tangga atau keluarga. Seperti yang diketahui selama ini, besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan ilustrasi atau gambaran pada kesejahteraan suatu rumah tangga.

Pola pengeluaran adalah salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur ekonomi penduduk (tingkat kesejahteraan), sedangkan pergeseran proporsi pola pengeluaran dapat mengindikasikan pada perubahan tingkat kesejahteraan penduduk (BKP, 2014). Menurut Dumairy (2004) konsumsi merupakan pembelanjaan atas barang-barang dan jasa. Pembelanjaan atas makanan, pakaian dan barang-barang kebutuhan lain digolongkan sebagai konsumsi. Produksi barang-barang yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan disebut barang konsumsi.

Proporsi pengeluaran yang lebih besar pada konsumsi makanan pada rumah tangga dapat mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga maka semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga atau keluarga dapat sejahtera apabila persentase pengeluaran makanan lebih kecil dari persentase pengeluaran non makanan (BPS, 2015).



Kebutuhan akan konsumsi atau pengeluaran, baik pangan dan kebutuhan non pangan, adalah kebutuhan yang secara umum berbeda. Pada kondisi pendapatan terbatas, kepentingan kebutuhan konsumsi pangan didahulukan, sehingga sebagian besar kelompok masyarakat berpendapatan rendah, akan mengalokasikannya untuk memenuhi kebutuhan makanan. Pada keadaan sebaliknya, dengan pergeseran dan peningkatan pendapatan, proporsi pengeluaran pada pangan dapat menurun dan pengeluaran untuk kebutuhan non pangan dapat meningkat (Sugiarto, 2008).

Persentase pengeluaran pangan di tingkat rumah tangga merupakan rasio pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga. Perhitungan persentase pengeluaran pangan pada tingkat rumah tangga dapat menggunakan formula berikut.

$$PF = \frac{PP}{TP} \times 100\%$$

Keterangan:

PF = Pangsa atau persentase pengeluaran pangan (%)  
 PP = Pengeluaran pangan rumah tangga (Rp/bulan)  
 TP = Total pengeluaran rumah tangga (Rp/bulan)

Persentase pengeluaran non-pangan di tingkat rumah tangga adalah rasio pengeluaran non-pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga. Perhitungan pangsa atau persentase pengeluaran non-pangan pada tingkat rumah tangga dapat menggunakan rumus seperti formula di bawah ini.

$$PNF = \frac{TNP}{TP} \times 100\%$$

Keterangan:

PNF = Pangsa atau persentase pengeluaran non-pangan (%)  
 PNP = Pengeluaran non-pangan rumah tangga (Rp/bulan)  
 TP = Total pengeluaran rumah tangga  
 (Rp/bulan) (Sinaga dan Ilham N, 2002).

Konsumsi adalah pendapatan yang dibelanjakan. Penghasilan keluarga yang masuk sebagian besar dibelanjakan kembali sebagai pengeluaran untuk membeli sesuatu yang diperlukan untuk hidup. Inti dari teori ekonomi yaitu dibelanjakan untuk dikonsumsi. Tidak hanya konsumsi berupa makanan, tapi juga mencakup barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup (Dumairy, 2004).

## 2. Pendapatan Rumah Tangga

Struktur pendapatan rumah tangga dapat terdiri dari dua atau lebih sumber pendapatan. Ragam dari sumber pendapatan rumah tangga tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan itu sendiri (Soeratno, 1996). Tingkat pendapatan rumah tangga adalah indikator yang penting dalam tingkat hidup rumah tangga. Pada umumnya, pendapatan dalam satu rumah tangga tidak hanya berasal dari sebuah sumber, namun dapat berasal dari dua sumber pendapatan atau lebih. Menurut Mosher (1987), tolak ukur penting untuk melihat kesejahteraan rumah tangga adalah dilihat dari pendapatan rumah tangga dan penyebab dari beberapa aspek kesejahteraan tergantung dari tingkat pendapatan. Besar kecilnya pendapatan rumah tangga dapat mempengaruhi kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.

Menurut Rodjak (2002), yang dimaksud pendapatan rumah tangga petani yaitu jumlah pendapatan dari usahatani dan luar usahatani yang diperoleh dalam setahun. Tingkat pendapatan petani dipengaruhi oleh beberapa sumber pendapatan yaitu petani sebagai pengelola, tenaga kerja petani, tenaga kerja keluarga petani, dan pendapatan keluarga petani. Lebih lanjut Rodjak (2002), menyatakan bahwa pendapatan rumah tangga diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan keluarga dari usahatani dan pendapatan keluarga yang berasal dari luar usahatani, dengan rumus seperti tertera di bawah.

$$P_{rt} = P_{usahatani} + P_{non-usahatani} + P_{lain-lain}$$

Keterangan:

$P_{rt}$	= Pendapatan rumah tangga masyarakat per tahun
$P_{usahatani}$	= Pendapatan dari usahatani
$P_{non-usahatani}$	= Pendapatan dari luar pertanian
$P_{luar\ usahatani}$	= Pendapatan dari luar usahatani

### 3. Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah kondisi penduduk yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum baik pangan maupun non pangan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan adalah penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang rata-rata memiliki pengeluaran (kapita per bulan) di bawah garis kemiskinan termasuk kategori penduduk miskin (BPS, 2015).

Lebih lanjut BPS (2015) menyatakan bahwa GKM merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk mengonsumsi makanan setara 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll. GKNM merupakan kebutuhan minimum yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Levitan (dalam Yulianto, 2005) menyatakan bahwa kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Perpres Nomor 7 tahun 2005 tentang RPJMN). Definisi tersebut berasal dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin dan golongan masyarakat lainnya memiliki hak-hak dasar yang sama. Ketidaksamaan dalam basis sosial dalam hal aset, sumber-sumber keuangan, organisasi dan jaringan sosial, pengetahuan dan informasi untuk memperoleh pekerjaan, dapat menjadikan seseorang menjadi miskin (Friedman dalam Yulianto, 2005).

Kemiskinan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yaitu berbasis keluarga. Keluarga miskin adalah keluarga yang masuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dengan alasan ekonomi. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, misalnya kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan

dan kesehatan. Keluarga Sejahtera I merupakan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal tetapi belum terpenuhi seluruh kebutuhan sosio-psikologinya misalnya kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga dan lingkungan dan transportasi.

Menurut Bank Dunia, penentuan garis kemiskinan dapat menggunakan metode pengukuran jumlah pendapatan minimal per kapita per hari. Pendapatan minimal per kapita per hari adalah U\$ 1. Penduduk dianggap miskin apabila memiliki pendapatan kurang dari U\$ 1. Menurut World Bank Institute (2005), ada empat alasan bahwa kemiskinan harus diukur. Pertama, orang miskin berada dalam agenda dan diperhatikan. Kedua, pengidentifikasian orang miskin dan keperluan intervensi tentang pengentasan kemiskinan. Ketiga, pemantauan dan evaluasi proyek atau kebijakan intervensi terhadap orang miskin. Keempat, evaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Lebih lanjut World Bank Institute (2005) menyebutkan bahwa terdapat tiga ukuran agregat kemiskinan yang dapat dihitung yaitu:

- (1) *Headcount Index* ( $P_0$ ) adalah ukuran agregat kemiskinan yang secara sederhana mengukur proporsi penduduk pada kategori miskin. Kelebihan pada kategori ini adalah mudah dalam perhitungan dan mudah dipahami dan kelemahannya adalah tidak memperhitungkan intensitas kemiskinan, tidak menunjukkan seberapa miskin yang miskin dan tidak berubah apabila penduduk yang berada di bawah GK menjadi lebih miskin.
- (2) Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$  atau *Poverty Gap Index*) adalah ukuran agregat kemiskinan yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai *Poverty Gap Index* artinya semakin dalam tingkat kemiskinan karena semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap GK.
- (3) Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ , *Poverty Severity Index* atau *Squared Poverty Gap Index*) adalah ukuran sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai *Poverty Severity Index* maka semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

#### a) Pengukuran Kemiskinan

Menurut BPS, terdapat 14 kriteria sebuah keluarga/rumah tangga dikategorikan sebagai miskin yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika pada tahun 2005. Suatu keluarga/rumah tangga dikatakan miskin apabila memenuhi/memiliki minimal 9 dari 14 kriteria berikut:

- (a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
- (b) Jenis lantai tempat tinggal yang terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- (c) Jenis dinding tempat tinggal yang terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester.
- (d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- (e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- (f) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan.
- (g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari kayu bakar/arang/minyak tanah.
- (h) Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu.
- (i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- (j) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
- (k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
- (l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600.000,00 per bulan.
- (m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah atau hanya SD.
- (n) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000,00 seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Menurut Bank Dunia indikator kemiskinan yaitu:

- (a) Kepemilikan tanah dan modal yang terbatas
- (b) Terbatasnya sarana dan prasarana, pembangunan yang bias di kota.
- (c) Kesempatan di antara anggota masyarakat yang berbeda.
- (d) Adanya perbedaan sumber daya manusia dan ekonomi.
- (e) Produktivitas yang rendah.

- (f) Budaya hidup yang buruk.
- (g) Tata pemerintahan yang buruk.
- (h) Adanya pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Menurut Suharto (2008) tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial yaitu:

- (a) Kelompok paling miskin (*destitute*) atau fakir miskin adalah kelompok yang secara absolut memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, umumnya tidak memiliki sumber pendapatan dan tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
- (b) Kelompok miskin (*poor*) adalah kelompok yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dan memiliki akses pada pelayanan sosial dasar.
- (c) Kelompok rentan (*vulnerable group*) adalah kelompok yang bebas dari kemiskinan dan memiliki kehidupan yang relatif baik, akan tetapi sebenarnya kelompok ini rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Apabila tidak mendapatkan pertolongan sosial, pada kondisi krisis ekonomi, kelompok ini dapat berpindah status rentan menjadi miskin.

Menurut Sajogyo (1977) salah satu indikator kemiskinan adalah konsep garis kemiskinan yang menggunakan ukuran setara beras dan membedakan “*cut-off point*” untuk pedesaan dan perkotaan. Konsep kemiskinan Sajogyo menyatakan bahwa masyarakat pedesaan dikatakan miskin bila pengeluaran berasnya setara kurang dari 320 kilogram per kapita per tahun; miskin sekali jika pengeluaran tersebut kurang dari 240 kilogram per tahun; dan paling miskin jika pengeluaran kurang dari 180 kilogram per kapita per tahun. Sedangkan untuk perkotaan, masing-masing kriteria tersebut memiliki tolok ukur 480, 360, dan 270 kilogram per kapita per tahun.

#### b) Penyebab Kemiskinan

Undang–undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Proopenas menerangkan bahwa penyebab kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) dan kemiskinan sementara (*transient poverty*). Kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yaitu kondisi kemiskinan karena sikap dan kebiasaan hidup

masyarakat yang tidak produktif, sumber daya terbatas dan keterisolasian, dan taraf pendidikan dan derajat kesehatan yang rendah, lapangan pekerjaan yang terbatas, dan masyarakat yang tidak berdaya. Adapun kemiskinan sementara (*transient poverty*) dapat disebabkan oleh siklus ekonomi yang berubah dari kondisi yang normal menjadi krisis ekonomi, perubahan kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan yang bersifat musiman dan bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan (Yulianto, 2005).

Menurut Bradshaw (2005), kemiskinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a) Kemiskinan disebabkan adanya kekurangan dari tiap individu.
- b) Kemiskinan disebabkan oleh adanya “budaya miskin” di daerah tempat tinggal.
- c) Kemiskinan disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan kesenjangan sosial atau diskriminasi.
- d) Kemiskinan dikarenakan oleh faktor letak geografis.
- e) Kemiskinan terjadi akibat kumulatif dari keempat alasan tersebut.

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2018) mengemukakan bahwa secara umum masyarakat miskin ditandai dengan rasa tidak berdaya atau tidak mampu dalam hal (1) pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan dalam kehidupannya; (2) melakukan kegiatan usaha produktif (*unproductiveness*); (3) menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi (*inaccessibility*); (4) menentukan nasibnya sendiri dan mendapatkan perlakuan diskriminatif, rasa takut dan curiga, serta sikap apatis dan fatalistik (*vulnerability*); serta (5) pembebasan diri dari mental dan budaya miskin serta merasa memiliki martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*).

Upaya pengentasan kemiskinan terbagi menjadi tiga arah kebijaksanaan. Arah kebijaksanaan tidak langsung pada keadaan yang menjamin kelangsungan pada upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijaksanaan langsung diarahkan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijaksanaan khusus pada masyarakat miskin dan aparat yang bertanggung jawab langsung pada kelancaran program (Soegijoko, 2005).

Upaya penanggulangan kemiskinan menurut Undang–undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas dapat dijalankan melalui dua strategi utama. Pertama, melindungi kelompok masyarakat pada kondisi kemiskinan sementara. Kedua, menolong masyarakat pada kondisi kemiskinan kronis dengan pemberdayaan dan pencegahan terjadi kemiskinan yang baru. Ada tiga program yang langsung ditujukan untuk penduduk miskin yaitu: 1) Penyediaan kebutuhan pokok, 2) Pengembangan sistem jaminan sosial, 3) Pengembangan budaya usaha masyarakat miskin. Ketiga kebijakan tersebut menurut Remi, Soemitro dan Tjiptoherijanto (2002) didasarkan pada kebutuhan untuk menutupi turunnya daya beli masyarakat akibat krisis ekonomi.

#### **4. Program Keluarga Harapan**

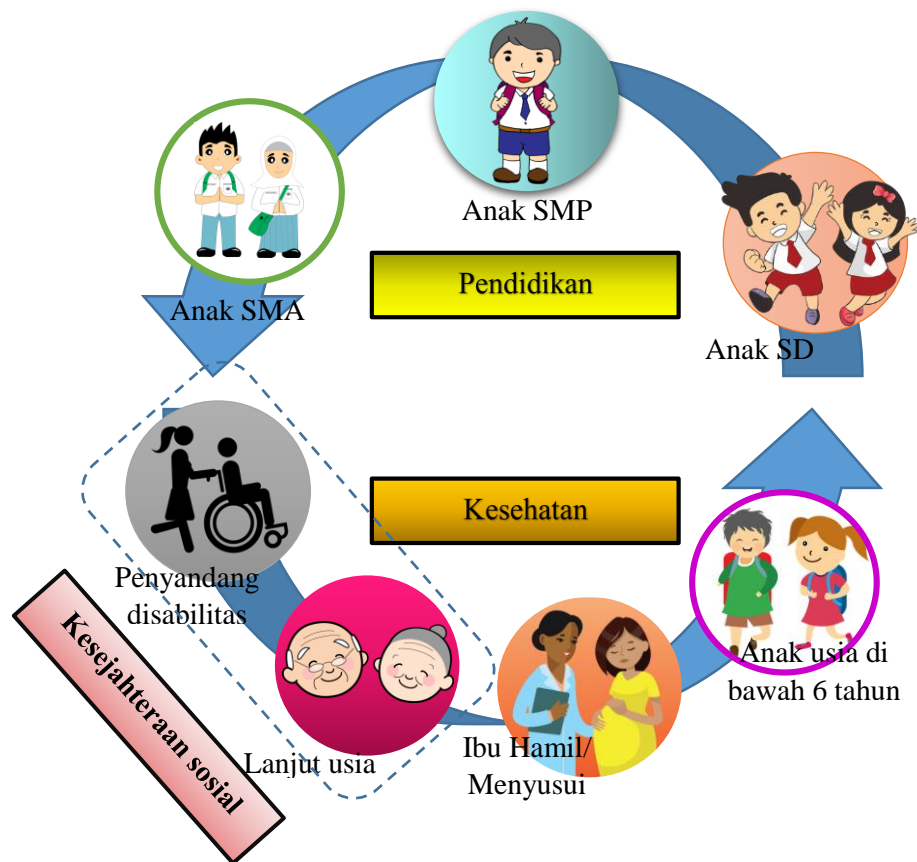
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial sejak tahun 2007. Program perlindungan sosial ini juga dikenal pada dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT). Program ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi masalah kemiskinan kronis yang telah dihadapi pada beberapa negara di dunia. PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. UU no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial perpres no. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Dasar-dasar hukum PKH adalah

- a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Kementerian Sosial, 2019).

Lebih lanjut Kementerian Sosial (2019) menerangkan bahwa kriteria Peserta PKH (KPM) adalah keluarga miskin yang terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT) dan memenuhi minimal salah satu syarat:



- a) Memiliki komponen kesehatan yaitu anak dengan usia dibawah enam tahun, ibu hamil atau menyusui.
- b) Memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah 6-21 tahun untuk peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat dan SMA/MA sederajat, termasuk penyandang disabilitas ringan atau sedang.
- c) Komponen kesejahteraan sosial seperti anak penyandang disabilitas ringan atau sedang, dan juga lansia dengan syarat usia tertentu. Gambar Komponen KPM PKH dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Komponen KPM PKH  
Sumber: Kementerian Sosial (2019)

PKH bukan dimaksudkan sebagai keberlanjutan dari program bantuan sebelumnya yang dikenal sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT diberikan pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sedangkan karakteristik utama PKH adalah mensyaratkan kewajiban pada penerima bantuan. Kewajiban KPM PKH berdasarkan kriteria komponen dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kewajiban anggota KPM PKH berdasarkan kriteria komponen

No	Komponen	Keterangan
1.	Komponen Kesehatan	
	a. Ibu hamil atau nifas	Pemeriksaan kehamilan di faskes minimal empat kali selama kehamilan (trimester I satu kali, trimester II satu kali dan trimester III dua kali), melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan ibu nifas empat kali selama 42 hari pasca melahirkan
	b. Bayi	(usia 0-11 bulan) Pemeriksaan kesehatan tiga kali dalam satu bulan pertama, ASI eksklusif selama enam bulan pertama, imunisasi lengkap, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan setiap bulan, pemberian suplemen vitamin A satu kali pada usia 6-11 bulan, dan pemantauan perkembangan minimal dua kali dalam setahun
	c. Anak Usia Dini	(usia 1 s.d < 5 tahun) Imunisasi tambahan, penimbangan berat badan setiap bulan, pengukuran tinggi badan minimal dua kali setahun, pemantauan perkembangan minimal dua kali dalam setahun, dan pemberian kapsul vitamin A dua kali dalam setahun (usia 5 s.d < 6 tahun) Penimbangan berat badan minimal dua kali setahun, pengukuran tinggi badan minimal dua kali setahun dan pemantauan perkembangan minimal dua kali dalam setahun
2	Komponen Pendidikan	
	a. Anak sekolah	Usia 6- 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD, SMP dan SLTA) harus terdaftar di sekolah atau pendidikan kesetaraan dan minimal 85 persen kehadiran di kelas
3	Komponen Kesejahteraan Sosial	
	a. Disabilitas berat	Merawat dan memastikan pemeriksaan minimal satu tahun sekali dengan layanan <i>home visit</i> (tenaga kesehatan datang ke rumah KPM jika penyandang disabilitas berat), dan layanan <i>home care</i> (pengurus memandikan, mengurus dan merawat KPM PKH)
	b. Lanjut usia 60 tahun ke atas	Memastikan pemeriksaan kesehatan serta penggunaan layanan <i>home care</i> (pengurus memandikan, mengurus dan merawat KPM lansia) dan <i>day care</i> (mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, lari pagi, senam sehat dan lainnya) bagi lansia tersebut minimal satu tahun sekali

Sumber: Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3, 4 dan 5 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 (Kepala Biro Hukum dan Kemsos, 2017)

Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada KPM yang terdaftar pada Basis Data Terpadu (BDT). Bantuan uang tunai dapat diberikan KPM dengan catatan jika KPM mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Peserta PKH wajib ikut serta, terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Kewajiban KPM pada bidang kesehatan yaitu pemeriksaan kandungan untuk ibu hamil, pemberian vitamin dan asupan gizi, imunisasi serta timbang badan balita

dan anak prasekolah. Kewajiban KPM pada bidang pendidikan yaitu mendaftar dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai dengan tingkatan jenjang pendidikannya. Khusus anggota keluarga KPM yang menyandang disabilitas, disesuaikan kewajiban pada kondisi disabilitas tersebut.

Menurut Kementerian Sosial (2018), seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajiban kepesertaan PKH. Pemenuhan kewajiban oleh KPM PKH akan berdampak pada bantuan sosial dan hak kepesertaan lainnya. KPM yang memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak sesuai ketentuan program. Sedangkan yang tidak melaksanakan kewajiban akan dikenakan penangguhan atau penghentian dana bantuan sosial sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Ketentuan penangguhan atau penghentian

No	Penangguhan	No	Penghentian
1.	Bantuan KPM ditangguhkan apabila pada tahap 1, 2 dan 3 tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah ditentukan minimal satu bulan dalam siklus penyaluran bantuan	1	KPM dihentikan kepesertaannya jika tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan sebanyak 3 tahap penyaluran bantuan selama masa kepesertaan
2	Penangguhan bantuan sosial PKH tahap 4 diberlakukan pada tahap 1 tahun berikutnya	2	KPM yang dihentikan kepesertaannya akan menerima bantuan sosial PKH yang ditangguhkan tahap-tahap sebelumnya.
3	Peserta PKH menerima kembali bantuan sosial PKH yang ditangguhkan apabila memenuhi kewajiban		

Sumber: Pedoman umum PKH (2019)

Suharto (2008) menggolongkan PKH ke dalam klaster I, dimana program-program pada kelompok ini memberikan perlindungan sosial dan bantuan sosial kepada sasaran yang tepat dan nanti pada gilirannya diharapkan dapat mengalami peningkatan kesejahteraan dan akhirnya berhenti menjadi penerima bantuan klaster I, dan berhak dan memenuhi kriteria menjadi penerima bantuan klaster II, atau bahkan tidak termasuk ke dalam kategori miskin lagi. Berbagai perlindungan dan bantuan sosial yang diberikan pada program Klaster I seperti program yang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin terutama untuk memenuhi kebutuhan pasokan gizi, pendidikan, dan kesehatan.

Pada program ini diharapkan agar KPM mampu dalam mengubah perilakunya dan lebih peduli terhadap kesehatan maupun pendidikan. Selain untuk KPM, sasaran utama PKH yaitu terutama pada generasi penerusnya. Akses terhadap kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial tersebut juga diharapkan agar mampu memperpendek jarak kesenjangan sosial, tidak berdaya dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada jati diri masyarakat miskin.

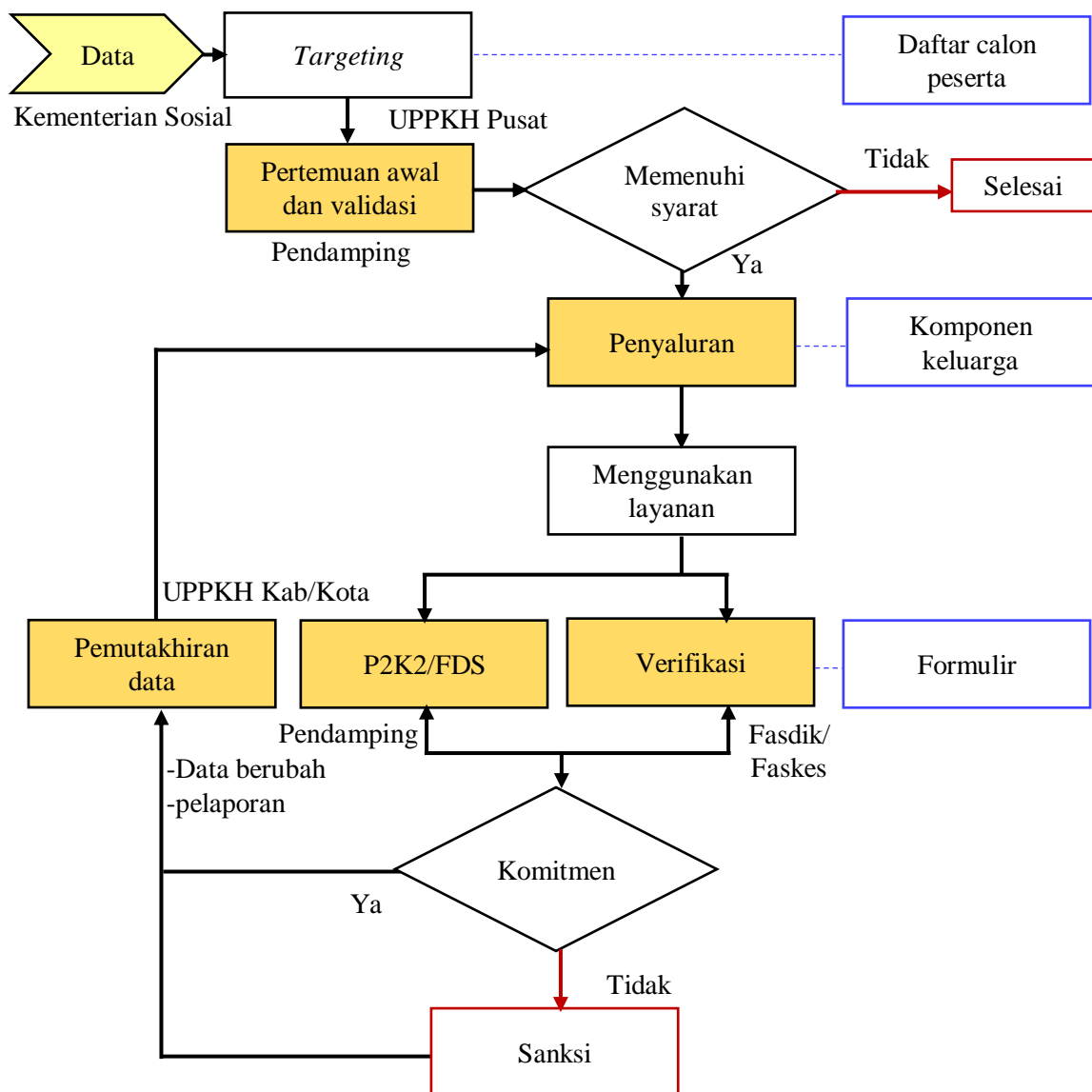
KPM tidak hanya menerima dana bantuan dalam bentuk uang non tunai, tapi juga KPM memperoleh bantuan pangan. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaga Negara Indonesia, 2017). Program BPNT merupakan penyaluran bantuan pangan non tunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya, melalui mekanisme akun elektronik berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang hanya digunakan untuk pembelian bahan pangan di tempat yang telah ditunjuk dan bekerjasama dengan bank Himbara. Pada KKS elektronik tersebut, didalamnya terdapat sistem *saving account dan e-wallet* atau dompet elektronik, sehingga KPM dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.

Berdasarkan Permensos No. 10 Tahun 2017 dan Permensos No. 25 Tahun 2016, BPNT adalah bantuan dari program pemerintah untuk warga yang termasuk kategori miskin di Indonesia dan datanya telah masuk ke dalam data PKH. KPM setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (elektronik warong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan bank negara seperti Bank BRI, BTN, dan lain sebagainya.

Tujuan program BPNT salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini telah diatur pada Peraturan Menteri Sosial No.10 Tahun 2017 tentang PKH dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, serta Peraturan menteri Sosial No.25 Tahun 2016 tentang bantuan pengembangan usaha melalui elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama Program Keluarga Harapan (Kepala Biro Hukum dan Kemensos, 2017).

Selain bantuan BPNT melalui kartu KKS untuk program PKH, semua KPM juga adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat. Jaminan dan kepastian KIS pada masyarakat kurang mampu adalah untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan. Selain itu, anak-anak dari KPM PKH yang berusia 6-21 tahun juga berhak mendapatkan layanan pendidikan sebagai penerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Seluruh program bantuan tersebut adalah fasilitas dari KPM PKH. Seluruh proses harus dilalui agar menjadi KPM PKH. Seluruh proses utama melalui tahap perencanaan, penetapan calon peserta, persiapan daerah, pertemuan awal dan validasi, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan, pendampingan, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session* (FDS), verifikasi komitmen pada fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, pemutakhiran data, transformasi kepesertaan dan pengaduan. Mekanisme pelaksanaan PKH dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Mekanisme Pelaksanaan PKH

Sumber: Kementerian Sosial (2019)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial (*Conditionality Social Transfer*) tunai bersyarat kepada KPM yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Sebagai imbalannya, KPM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terlibat pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada pendidikan dan kesehatan. Tujuan dari PKH yaitu untuk mengurangi jerat kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya KPM. Secara khusus tujuan PKH terdiri atas:

- a) Peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi KPM
- b) Peningkatan taraf pendidikan KPM
- c) Peningkatan taraf kesehatan ibu hamil atau menyusui dan anak dibawah usia enam tahun
- d) Peningkatan kondisi ekonomi KPM (Kementerian Sosial, 2019).

Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara peningkatan kualitas dari sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Bantuan ini membantu dalam pengurangan beban pengeluaran RTSM jika dilihat dalam jangka pendek, sedangkan untuk jangka panjang, dengan memberikan syarat kepada KPM agar mau menyekolahkan anaknya, imunisasi balita, pemeriksaan kandungan untuk ibu hamil dan perbaikan gizi anak, diharapkan program ini akan dapat memutuskan rantai kemiskinan antargenerasi.

#### **5. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Focus Development Session (FDS)***

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Focus Development Session (FDS)* adalah sebuah intervensi perubahan perilaku terstruktur kepada KPM dan diberikan sejak tahun pertama kepesertaan PKH. Edukasi dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan pemahaman kepada KPM PKH tentang pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak dan pengasuhan lanjut usia dan disabilitas. Edukasi berisi materi yang wajib disampaikan melalui pertemuan kelompok setiap bulan yang disampaikan oleh pendamping sosial PKH terhadap kelompok-kelompok dampungannya (Kementerian Sosial, 2019).

Lebih lanjut Kementerian Sosial (2019) menjabarkan bahwa tujuan dari P2K2 atau FDS adalah untuk

- a) Peningkatan pengetahuan KPM PKH tentang pengasuhan anak dan mendukung pendidikan anak di sekolah
- b) Peningkatan pengetahuan praktis KPM PKH tentang pengelolaan keuangan keluarga dan dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan, perencanaan

menabung dan menghindari hutang dan meningkatkan penghasilan dengan membuka usaha

- c) Peningkatan kesadaran KPM PKH tentang 1.000 hari pertama kehidupan untuk kesehatan ibu hamil dan bayi
- d) Peningkatan kesadaran KPM PKH tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan pemenuhan hak anak.
- e) Peningkatan kesadaran KPM PKH tentang hak lansia dan disabilitas
- f) Peningkatan kesadaran KPM PKH tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam memanfaatkan layanan umum dari pemerintah untuk perbaikan dalam bidang pendidikan dan kesehatan

Komponen-komponen yang digunakan dalam pelaksanaan P2K2 atau FDS adalah

- a) Modul P2K2 yang berisikan materi terstruktur untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin yang berfokus pada bidang ekonomi, pendidikan anak, kesehatan dan perlindungan anak. Modul P2K2 disampaikan oleh pendamping sosial PKH kepada KPM PKH dengan memperhatikan kebutuhan KPM. Modul P2K2 dapat dilihat pada Gambar 9.
- b) Diklat P2K2 kepada pendamping sosial PKH sesuai ketentuan dan kebijakan program
- c) Bahan ajar berupa modul, buku pintar, *flipchart*, poster dan brosur dan peralatan lainnya yang mendukung penyampaian materi diselenggarakan oleh Kementerian Sosial atau pihak-pihak lain yang ingin berkontribusi
- d) Waktu pelaksanaan P2K2 dilakukan wajib setiap bulannya selama masa kepesertaan KPM PKH
- e) Pada pelaksanaannya P2K2 menjadi dari ukuran kinerja seorang pendamping dengan supervisi dari koordinator kabupaten atau kota, dan koordinator wilayah.



 Kesehatan dan Gizi	 Pendidikan	 Ekonomi	 Perlindungan Anak	 Kesejahteraan Sosial
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentingnya 1.000 hari kehidupan</li> <li>• Gizi ibu hamil &amp; pemeriksaan kehamilan</li> <li>• Menyusui dan layanan kesehatan setelah kehamilan</li> <li>• Kesakitan dan kesehatan lingkungan (cuci tangan, jamban, dll)</li> <li>• KIS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadi orangtua yang sukses</li> <li>• Memahami perilaku belajar anak usia dini</li> <li>• Menumbuhkan perilaku positif anak</li> <li>• Membantu anak sukses di sekolah</li> <li>• Program Indonesia Pintar (PIP) dan bidik misi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur sumberdaya yang terbatas</li> <li>• Strategi menabung dan berhutang</li> <li>• Memulai usaha sendiri dan usaha kecil menengah (mikro)</li> <li>• Kewirausahaan</li> <li>• Pemasaran</li> <li>• KUBE jasa dan produksi, KUBE PKH dan E-Warong</li> <li>• BPNT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan kekerasan anak</li> <li>• Pencegahan penelantaran anak</li> <li>• Anak berkebutuhan khusus</li> <li>• Mencegah kekerasan dalam rumah tangga</li> <li>• Perlindungan ibu</li> <li>• Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawatan kesehatan lansia dan penyandang disabilitas</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan dasar lansia dan penyandang disabilitas</li> <li>• <i>Home care services</i></li> </ul>

Gambar 9. Modul P2K2 atau FDS  
Sumber: Kementerian Sosial (2019)

## 6. Determinan Pengeluaran

Terdapat beberapa faktor yang menentukan pengeluaran individu atas barang-barang dan jasa-jasa dalam suatu perekonomian. Menurut Spencer (1977), faktor yang mempengaruhi pengeluaran diantaranya adalah pendapatan sebagai faktor utama, jumlah anggota keluarga dan usia dari anggota keluarga. Pendapatan sebagai faktor utama karena pendapatan merupakan seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang dinilai dengan jumlah uang atas harga yang berlaku saat ini dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Menurut Waluyo (2002), pada teori yang digunakan oleh Duesenberry berasumsi bahwa terdapat dua faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi seseorang adalah a) selera rumah tangga atas barang yang dikonsumsi adalah interdependen yang artinya pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi oleh masyarakat sekitarnya (tetangga) atau biasa disebut dengan faktor lingkungan, dan b) pengeluaran konsumsi adalah *irreversible* artinya naik dan turunnya jumlah penghasilan akan

berbeda pula pola pengeluarannya. Pengeluaran seseorang dalam jangka pendek dapat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan relatif. Pendapatan relatif yaitu pendapatan tertinggi yang pernah dicapai seseorang. Misalnya pendapatan seseorang mengalami kenaikan maka secara otomatis pengeluaran konsumsi akan mengalami kenaikan dengan proporsi tertentu, dan sebaliknya apabila pendapatan mengalami penurunan maka akan diikuti juga oleh penurunan pengeluaran konsumsinya namun proporsi penurunan lebih kecil akibat penurunan pendapatan.

Tingkat pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap pengeluaran jenis dan jumlah bahan pangan yang dikonsumsi. Menurut hukum Bennet, semakin tinggi pendapatan maka akan semakin baik kualitas konsumsi pangan dan tercermin dari perubahan pembelian bahan pangan dari pembelian bahan pangan yang harganya murah menjadi lebih mahal (pangan berkualitas). Sebaliknya, masyarakat berpendapatan rendah akan mengubah kebiasaan frekuensi makannya misalnya dari tiga kali sehari menjadi dua kali sehari. Masyarakat berpendapatan rendah juga cenderung mengganti konsumsi pangan misalnya dengan mengganti tempe dan tahu sebagai sumber protein untuk menggantikan daging (Martianto dan Ariani, 2004).

Menurut Rahardja, Pratama dan Manurung (2005) semakin tinggi pendidikan seseorang, maka pengeluaran konsumsinya juga semakin tinggi sehingga hubungan keduanya adalah positif. Jika seseorang atau rumah tangga memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka kebutuhan hidupnya akan semakin banyak. Kondisi ini disebabkan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan makan dan minum, namun juga kebutuhan akan informasi, hubungan antar masyarakat yang baik, dan pengakuan dari orang lain tentang eksistensinya.

Jumlah anggota keluarga merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu pengeluaran rumah tangga. Semakin besar jumlah anggota rumah tangga maka semakin besar jumlah tanggungan dan semakin besar pendapatan yang dikeluarkan untuk biaya hidup. Bagi rumah tangga miskin, jumlah anggota yang banyak akan menyebabkan keluarga menjadi semakin miskin. Pada kasus rumah tangga miskin, jumlah anggota keluarga yang banyak dan tidak produktif akan

menyebabkan pengeluaran rumah tangga menjadi terbebani. Menurut Purwanto dan Taftazani (2018), jumlah tanggungan keluarga adalah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan keluarga tersebut, namun semakin banyak jumlah tanggungan yang dimiliki akan berpengaruh pada tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin banyak tanggungan di dalam rumah tangga, maka akan semakin bervariasi alokasi masing-masing pengeluaran setiap individu di dalam rumah tangga dan hal ini harus diimbangi dengan pendapatan yang cukup.

Pitomo (1992) menyatakan bahwa rumah tangga miskin pada umumnya mengeluarkan pendapatannya lebih besar untuk kebutuhan dasar, baik yang terdiri dari kebutuhan maupun konsumsi individu (makanan, pakaian, perumahan) maupun keperluan pelayanan sosial tertentu (air minum, sanitasi, transportasi, kesehatan dan pendidikan). Pendidikan merupakan proses pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara terencana, sehingga diperoleh perubahan dalam meningkatkan taraf hidup. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi kreativitas dan kemampuan seseorang dalam menerima inovasi sehingga pendidikan memberikan bekal bagi individu untuk masa depannya.

## **B. Telaah Penelitian Terdahulu**

Sebagai data pendukung maka sebuah dasar atau acuan beberapa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil sebagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting. Kajian penelitian terdahulu diperlukan sebagai referensi. Penelitian terdahulu mengenai pendapatan, pengeluaran dan determinan yang berhubungan dengan pengeluaran menjadi salah satu literatur dan acuan atau landasan dalam penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka telaah penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Telaah penelitian terdahulu

No	Penulis	Tema Jurnal	Metode analisis	Hasil Temuan dan Implikasi
1	Prianti, Arifin, Nugraha (2016)	Peran Kebijakan Raskin Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung	Analisis deskriptif kuantitatif, uji beda dan tabulasi silang	Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya pengurangan beban pengeluaran pada jenis golongan padi-padian rumah tangga setelah Raskin sebesar 4,69 %. Adanya peningkatan konsumsi sumber protein nabati (1%), sumber protein hewani (2,22%) dan buah-buahan (1%) setelah menerima subsidi Raskin di Kota Bandar Lampung. Pada pengeluaran non pangan seperti kebutuhan kesehatan, sandang, perumahan dan telekomunikasi hanya meningkat kurang dari 1%. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi respon rumah tangga terhadap kebijakan kartu pangan di Kota Bandar Lampung yaitu jumlah tanggungan dan pendapatan, sedangkan usia dan pendidikan responden tidak berpengaruh terhadap respon rumah tangga.
2	Rosiana dan Saskara (2018)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Rumah Tangga Pekerja Wanita yang Bekerja di Industri Laundry Rumah Tangga di Kecamatan Denpasar Selatan	Analisis Kuantitatif dan menggunakan model analisis jalur ( <i>path analysis</i> )	Berdasarkan hasil penelitian, variabel upah pekerja, pendapatan suami jumlah tanggungan keluarga dan jam kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga pekerja wanita. Tingkat pendidikan dan umur berpengaruh negatif terhadap pengeluaran rumah tangga pekerja wanita yang bekerja di industri laundry di Kecamatan Denpasar Selatan.
3	Amaliyah dan Handayani (2011)	Analisis Hubungan Proporsi Pengeluaran dan Konsumsi Pangan dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi di Kabupaten Klaten	Analisis deskriptif	Besarnya rata-rata proporsi pengeluaran non pangan sebesar 37,06 persen terhadap pengeluaran total rumah tangga petani, sedangkan proporsi pengeluaran konsumsi pangan adalah 62,94 persen terhadap pengeluaran total di Kabupaten Klaten. Pada hasil tersebut terlihat bahwa pengeluaran untuk konsumsi pangan lebih besar dari pengeluaran non pangan pada pengeluaran rumah tangga petani.

No	Penulis	Tema Jurnal	Metode analisis	Hasil Temuan dan Implikasi
4	Purwaningsih, Hartono, Masyhuri, dan Mulyo (2010)	Pola Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Menurut Tingkat Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah	Analisis deskriptif	Terdapat perbedaan yang signifikan pada proporsi pengeluaran pangan antara rumah tangga tahan dan kurang pangan serta rumah tangga rentan dan rawan pangan. Pada tiap tingkatan ketahanan pangan, pengeluaran rumah tangga pada makanan-minuman siap konsumsi menunjukkan proporsi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kelompok pangan yang lainnya. Semakin tidak tahannya pangan pada suatu rumah tangga, maka semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk tembakau. Menurut tingkat ketahanan pangan, rumah tangga di daerah perkotaan memiliki proporsi pengeluaran beras lebih kecil jika dibandingkan dengan rumah tangga di daerah pedesaan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan prioritas penanganan masalah ketahanan pangan seharusnya diberikan kepada kelompok rumah tangga rentan dan rawan pangan.
5	Purwanto, Sumartono, Makmur (2013)	Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan	Analisis deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, umumnya pelaksanaan PKH di Kecamatan Mojosari berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada setiap tahapan proses pelaksanaan yang berjalan dengan lancar. Apabila dilihat dari keadaan penerima bantuan PKH, peserta PKH menggunakan dana PKH untuk membantu kondisi sosial serta pendidikan anak, membantu biaya kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah enam tahun dari rumah tangga sangat miskin, serta menyadarkan KPM bahwa betapa pentingnya layanan pendidikan dan kesehatan untuk kesejahteraan keluarga KPM di masa depan yang lebih baik.
6	Kholif, Noor, Siswidiyanto. (2014)	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto	Analisis deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil dari jurnal ilmiah, tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai. Adanya masyarakat yang protes terindikasi bahwa dalam pelaksanaannya, PKH tidak berhasil dalam pemberian arahan dan bimbingan kepada KPM agar berusaha untuk menjadi masyarakat mandiri dan tanpa adanya campur tangan dan ketergantungan kepada pemerintah.

No	Penulis	Tema Jurnal	Metode analisis	Hasil Temuan dan Implikasi
				Selain itu, diketahui bahwa tujuan PKH belum memperoleh hasil maksimal. Masih adanya kemiskinan, gizi buruk, ibu meninggal karena melahirkan, serta rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Rekomendasi yang dapat menjadi sebuah pemasukan bagi program ini adalah menambah biaya operasional dan memperbaiki fasilitas, sanksi harus dilaksanakan, menambah pegawai dengan perekrutan yang baik, mengevaluasi kebijakan serta pemberian penghargaan kepada perseorangan.
7	Suleman dan Resnawaty (2016)	Program Keluarga Harapan (PKH) antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan	Analisis deskriptif kualitatif	Sebenarnya ini adalah bentuk pengentasan kemiskinan namun model ini yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dimana pemerintah memiliki peran yang besar dalam menyediakan santunan minimal agar masyarakat dapat mencapai kualitas hidup minimal.
8	Bungkaes, Posumah dan Kiyai (2013)	Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud	Analisis kuantitatif, Analisis persentase (analisis tabel frekuensi), analisis Chi-Square (kai-kwadrat)	Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan yang positif dan nyata antara efektivitas pengelolaan program Raskin dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Pada jurnal tersebut memberi saran bahwa sebaiknya pelaksanaan program ini dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan dan agar memperbaiki manajemen pendistribusiannya sehingga dapat menjangkau seluruh RTM yang ada di titik distribusi (desa).
9	Simanjuntak, Puspitawati, dan Djamaludin (2010)	Karakteristik Demografi, Sosial dan Ekonomi Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan	Analisis kuantitatif dengan menggunakan Microsoft excel dan SPSS	Penerimaan total keluarga meningkat drastis sebesar 1,3 kali lipat pada saat memperoleh PKH. Adapun kategori kemiskinan tidak adanya perubahan dengan adanya PKH, namun dalam kepemilikan alat elektronik meningkat. Kepala keluarga mempunyai kontribusi terbesar baik pra PKH maupun saat PKH terhadap penerimaan total keluarga serta secara statistik adalah berbeda nyata.

No	Penulis	Tema Jurnal	Metode analisis	Hasil Temuan dan Implikasi
			Menggunakan alat analisis <i>Paired Samples T-Test</i>	Pengeluaran rata-rata per bulan keluarga untuk golongan pangan sebesar 70,1% dan non pangan 29,9%. Adanya peningkatan yang signifikan menjadi hampir dua kali lipat keluarga yang berhutang saat mendapat dana PKH. Kemampuan membayar hutang dengan aset yang dimiliki, semakin meningkat dengan diperolehnya dana PKH.
10	Rizkillah dan Simajuntak (2018)	Allocation of Expenditure of Poor Family as a Recipient of Program Keluarga Harapan (PKH)	Analisis deskriptif kombinasi disain <i>cross-sectional</i> dan retrospektif	Hasil penelitian pada jurnal tersebut menunjukkan alasan keluarga mendapat dana PKH karena adanya anak usia sekolah, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Dana PKH dihabiskan oleh keluarga dengan kisaran rata-rata waktu dua minggu. Manfaat yang sangat dirasakan oleh penerima PKH adalah peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatnya jumlah tabungan keluarga, dan pendapatan total keluarga. Alokasi dana PKH lebih dari separuhnya digunakan untuk investasi manusia dan sepertiganya untuk kegiatan konsumtif.
11	Hidayat (2018)	Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Margahayu	Analisis deskriptif	Efektivitas pelaksanaan program PKH dinyatakan sudah efektif berdasarkan pada aspek pemahaman program, aspek tepat sasaran dan aspek tepat waktu.
12	Alpharesy, Anna dan Yustiati (2012)	Analisis Pendapatan dan Pola Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan Buruh di Wilayah Pesisir Kampak Kabupaten Bangka Barat	Analisis deskriptif	Kegiatan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian utama nelayan buruh pesisir Kampak memberikan kontribusi sebesar 49 persen terhadap total pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga nelayan buruh pesisir Kampak menghabiskan 83 persen pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan.

No	Penulis	Tema Jurnal	Metode analisis	Hasil Temuan dan Implikasi
13	Hasibuan dan Lestari (2016)	Analisis Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Simalungun	Analisis deskriptif kuantitatif	Pada penelitian diperoleh bahwa rata-rata pengeluaran untuk konsumsi makanan rumah tangga responden (Rp566.742) daripada konsumsi non makanan (Rp314.052). Pada pengeluaran beras (31,4 persen) paling tinggi daripada pengeluaran makanan lainnya, sedangkan untuk pengeluaran non makanan yang paling tinggi yaitu perumahan dan bahan bakar (33,1 persen) dari pengeluaran non makanan lainnya.
14	Bahrin, Syaparuddin dan Hardiani (2013)	Analisis Pendapatan dan Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sarolangun	Analisis deskriptif	Pada jurnal tersebut dapat dilihat jika dilihat dari pola pengeluaran RTSM di Kabupaten Sarolangun rata-rata konsumsi bahan makanan lebih tinggi (72,96 persen) daripada konsumsi bukan makanan (12,07 persen) seperti listrik, gas, air dan sisanya untuk konsumsi lain-lain. Artinya pola pengeluaran termasuk konsumsi primer.
15	Iskandar (2017)	Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin di Kota Langsa	Analisis deskriptif	Pada jurnal penelitian dapat dilihat bahwa variabel pendapatan (X) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pola pengeluaran rumah tangga (Y) miskin di Kota Langsa dan sebesar 80,5 persen pendapatan memberi pengaruh pada pola pengeluaran untuk rumah tangga miskin dan sisanya 19,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain.
16	Humaidi, Amin dan Suryati (2015)	Pola Pengeluaran Rumah Tangga Petani Karet di Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi	Analisis deskriptif kuantitatif	Pada jurnal penelitian rata-rata pendapatan petani karet per tahun lebih besar dari usahatani karet (80,71 persen) daripada pendapatan luar usahatani karet (19,29 persen). Semakin tinggi pendapatan rumah tangga petani karet maka semakin rendah proporsi pengeluaran pangan serta terdapat kecenderungan pada peningkatan pendapatan terhadap proporsi pengeluaran non pangan.



No	Penulis	Tema Jurnal	Metode analisis	Hasil Temuan dan Implikasi
17	Wuryandari (2015)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Makanan, Pendidikan Dan Kesehatan Rumah Tangga	Analisis deskriptif	Pada regresi terlihat tahapan siklus hidup rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga dan daerah tempat tinggal terdapat pengaruh konsisten pada proporsi pengeluaran makanan, total pengeluaran pendidikan, dan total pengeluaran kesehatan. Semakin banyak jumlah anggota rumah tangga dapat meningkatkan proporsi pengeluaran makanan, pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Rumah tangga di perkotaan memiliki pengaruh paling besar terhadap proporsi pengeluaran makanan, pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Terdapat bahwa rumah tangga yang memiliki proporsi pengeluaran pangan terbesar tetapi pengeluaran pendidikan dan kesehatannya terkecil adalah rumah tangga yang bekerja mandiri
18	Azizi, Manadiyanto, dan Koeshendrajana (2011)	Pendapatan dan Pola Pengeluaran Konsumsi Petambak Garam di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep	Analisis deskriptif	Pada jurnal tersebut, sumber pendapatan pada petambak garam yang mengandalkan dari usaha garam 53,13 persen, petambak garam yang sumber pendapatannya berasal dari usaha garam dan perikanan sebanyak 28,12 persen, serta petambak garam yang berasal lebih dari dua sumber mata pencaharian sebesar 12,50 persen. Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga pada petambak garam pada tahun 2008 yaitu Rp15.444.000 per tahun dan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar Rp19.624.000 per tahun.
19	Syaifullah , Eliza, Tarumun (2017)	Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga pada Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Pekanbaru	Analisis deskriptif	Hasil penelitian tentang analisis pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada kawasan KRPL di Kota Pekanbaru yaitu pendapatan petani meningkat setelah mengikuti program KRPL (karena mampu menekan angka pengeluaran konsumsi sayur sayuran). Proporsi pengeluaran pangan rumah tangga kelompok tani KRPL lebih kecil dari proporsi pengeluaran non pangan sebesar 44,15 persen.

No	Penulis	Tema Jurnal	Metode analisis	Hasil Temuan dan Implikasi
20	Simbolon (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Medan Tuntungan	Regresi linier berganda	Pada hasil penelitian jurnal tersebut, faktor-faktor yang memiliki pengaruh nyata terhadap pengeluaran pangan rumah tangga miskin adalah pendapatn rumah tangga dan jumlah anggota keluarga sedangkan yang memiliki pengaruh nyata negatif terhadap pengeluaran pangan rumah tangga miskin adalah jumlah subsidi beras untuk keluarga miskin (raskin). Faktor-faktor yang tidak berpengaruh nyata terhadap pengeluaran pangan rumah tangga miskin adalah tingkat pendidikan ibu dan lamanya perkawinan.
21	Sari, Syahnur dan Seftaria (2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Rokok pada Rumah Tangga Miskin di Provinsi Aceh	Analisis regresi berganda	Pada hasil penelitian diperoleh bahwa Tahun 2010 faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi rokok pada rumah tangga miskin di Aceh adalah pendapatan dan pengeluaran makanan tanpa rokok, sedangkan pada Tahun 2015 faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi rokok adalah pendapatan, pengeluaran makanan tanpa rokok, pengeluaran kesehatan dan pengeluaran pendidikan.
22	Sahudini, Yunus dan Zani (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Petani Cengkeh di Desa Totallang Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara	Regresi linier berganda	Faktor pendapatan dan jumlah anggota keluarga secara parsial berpengaruh terhadap pengeluaran pangan sedangkan pendidikan ayah rumah tangga dan ibu rumah tangga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran pangan.
23	Hildayanti, Jenahar dan Oemar (2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran rumah Tangga Petani Karet di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan	Analisis regresi berganda	Pada hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga petani dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pendapatan rumah tangga, jumlah keluarga dan peremajaan karet dan pengaruh secara negatif oleh tabungan rumah tangga, pendidikan formal, pengeluaran konsumsi kebutuhan pokok dan usia petani.

No	Penulis	Tema Jurnal	Metode analisis	Hasil Temuan dan Implikasi
24	Faradina, Iskandarini, Lubis (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pangan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat)	Analisis linier berganda	Pada penelitian ini faktor pendapatan dan jumlah anggota keluarga mempengaruhi pengeluaran pangan rumah tangga, sedangkan pendidikan ibu dan lamanya berumah tangga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran pangan rumah tangga.
25	Illahi, Adry dan Triani (2018)	Analisis Determinan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Analisis linier berganda	Pada hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga.
26	Selian dan Jannah (2018)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Rumah Tangga Keluarga Miskin di Desa Tertinggal Kabupaten Aceh Tengah	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan dan pendidikan berpengaruh positif dan lingkungan tempat tinggal berpengaruh negatif terhadap pola konsumsi rumah tangga
27	Fatimah dan Syamsiyah (2018)	Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga Petani Padi di Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang, Jawa Barat	Analisis deskriptif	Proporsi pengeluaran pangan tertinggi yaitu tembakau (22 persen) dan padi-padian (21 persen) dari pengeluaran pangan rumah tangga. Kebutuhan pendidikan merupakan paling tinggi pengeluarannya apabila dibandingkan dengan pengeluaran non pangan lainnya. Proporsi pengeluaran pangan (60 persen) lebih tinggi dari pengeluaran non pangan (40 persen).

### **C. Kerangka Pemikiran**

Kemiskinan merupakan masalah yang menjadi sebuah teka teki dan belum terpecahkan hingga saat ini. Fokus utama kemiskinan adalah mensejahterakan masyarakat sangat miskin untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

Penanggulangan kemiskinan tentunya harus menjadi sorotan utama bagi pemerintah, mengingat di Indonesia sendiri masih banyak terdapat masyarakat miskin. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Badan Pusat Statistik (2018) diperoleh bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,82 persen. Angka tersebut masih lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung yang berada di 13,01 persen.

Sebagai salah satu daerah perkotaan di Provinsi Lampung, tantangan terbesar Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melambatnya penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2018), diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung masih tinggi, yaitu 13,14 persen. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah berupaya penuh dalam hal pemberantasan kemiskinan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.

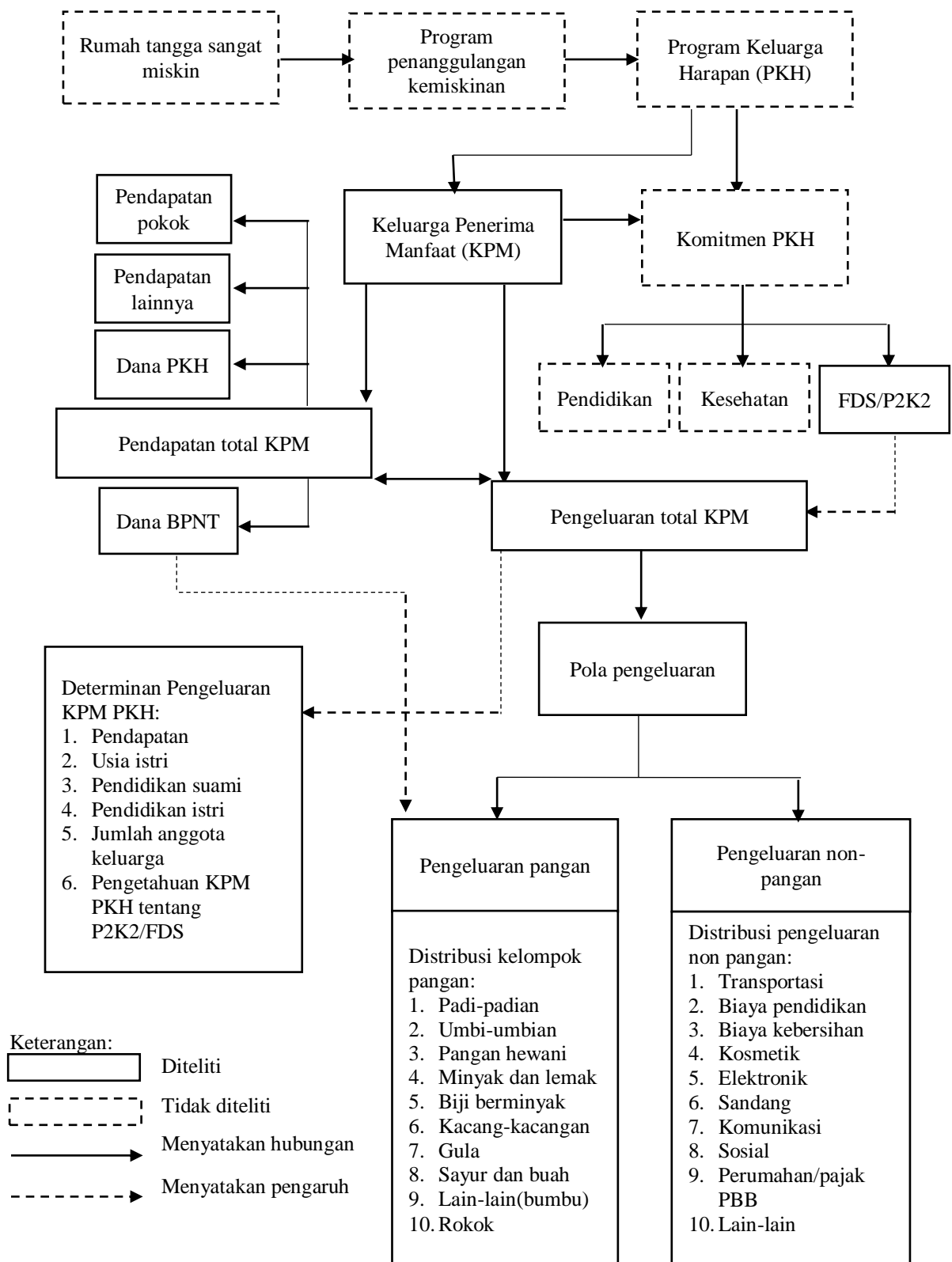
Salah satu program penanggulangan kemiskinan pada rumah tangga sangat miskin yaitu PKH. PKH bertujuan untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan bagi KPM atau biasa disebut peserta PKH. Peserta PKH adalah keluarga sangat miskin yang diwakili ibu dalam keluarga. Menurut Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (2013), tujuan khusus PKH adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia dengan akses kesehatan dan pendidikan yang lebih mudah. Hal ini berarti agar penerima PKH dapat menggunakan bantuan tersebut untuk menyekolahkan anak mereka dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak.

Inti dari program PKH yaitu untuk menanggulangi kemiskinan melalui akses pendidikan dan kesehatan. Terdapat tiga komitmen yang harus dilaksanakan oleh KPM PKH. KPM harus melaksanakan komitmen PKH pada akses pendidikan, kesehatan dan P2K2 atau FDS. Pada kegiatan P2K2 atau FDS, kegiatan tersebut

adalah pelatihan peningkatan kemampuan keluarga dengan memberikan materi dalam bentuk modul. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang di Provinsi Lampung yang melaksanakan P2K2 atau FDS. Pemerintah berharap agar peran P2K2 atau FDS di dalam PKH dapat mendidik KPM untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik.

Tingkat kemiskinan rumah tangga dapat digambarkan dengan pendapatan dan pola pengeluaran KPM. Pendapatan rendah dapat menyebabkan daya beli juga rendah oleh sebab itu rumah tangga miskin dapat melakukan dua pilihan untuk membelanjakan pendapatan yang diperolehnya atau bahkan mungkin harus menghilangkan beberapa kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Pola pengeluaran rumah tangga secara umum dibedakan atas pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Menurut Bahrudin, Syaparuddin dan Hardiani (2013) yang pola pengeluaran rumah tangga sangat miskin di Kabupaten Sarolangun rata-rata konsumsi bahan makanan lebih tinggi (72,96 persen) daripada konsumsi bukan makanan (12,07 persen).

Pengeluaran pangan rumah tangga (pangan dan non pangan) dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yaitu bantuan pangan ataupun bantuan uang bagi kelompok sangat miskin atau KPM. Harapannya, pemberian bantuan PKH dapat berjalan sesuai dengan target dan tujuan dari pemerintah yaitu memperbaiki kesejahteraan rumah tangga KPM dan menurunkan kemiskinan. Menurut Iskandar (2017), bahwa variabel pendapatan (X) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pola pengeluaran rumah tangga (Y) miskin di Kota Langsa. Namun, pada kenyataannya saat ini kondisi KPM PKH di Kota Bandar Lampung belum mampu terbebas dari jerat kemiskinan sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pendapatan, pengeluaran serta determinan pengeluaran KPM PKH di Kota Bandar Lampung. Alur pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Alur pemikiran pola pengeluaran KPM PKH di Kota Bandar Lampung

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan tujuan maka hipotesis yang dirumuskan sebagai dasar pemecahan masalah penelitian yaitu: Diduga pendapatan, usia, pendidikan suami, pendidikan KPM, jumlah anggota keluarga dan peran P2K2 dan FDS berpengaruh nyata terhadap pengeluaran rumah tangga pada KPM PKH di Kota Bandar Lampung.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei adalah metode dengan pengamatan langsung dari suatu populasi baik besar maupun kecil dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data dan informasi dapat berupa karakteristik, tindakan, pendapat dari sekelompok responden yang representatif yang dianggap sebagai populasi (Sugiarto, 2008). Penelitian ini menguraikan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh di lapangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapat gambaran secara faktual dan akurat mengenai objek penelitian.

#### **B. Konsep Dasar dan Batasan Operasional**

Konsep dasar dan batasan operasional dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan batasan yang jelas pada data yang akan dianalisis, variabel yang diteliti didefinisikan secara operasional sehingga dapat dilakukan pengukuran sehubungan dengan tujuan penelitian. Adapun definisi operasional dapat dilihat sebagai berikut.

Pendapatan total KPM PKH adalah semua pendapatan yang diperoleh dari kegiatan rumah tangga yang terdiri dari pendapatan utama rumah tangga, pendapatan lainnya dan pendapatan dari bantuan (PKH dan BPNT) yang diukur dalam rupiah (Rp) per tahun.

Pendapatan utama KPM PKH yaitu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dari pekerjaan utama rumah tangga baik dari pekerjaan suami maupun istri pada KPM PKH dalam rupiah (Rp) per tahun.



Pendapatan lainnya yaitu pendapatan yang diterima rumah tangga dari pekerjaan sampingan selain pekerjaan utama suami dan istri dalam rupiah (Rp) per tahun.

Pendapatan dari dana bantuan yaitu pendapatan yang diterima rumah tangga dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam rupiah (Rp) per tahun.

Pengeluaran rumah tangga adalah jumlah uang dalam rupiah yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan, kebutuhan sekunder dan barang tahan lama, dan tabungan.

Total Pengeluaran KPM adalah seluruh biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh seluruh anggota rumah tangga penerima bantuan PKH, yang meliputi pengeluaran pangan dan non pangan, yang diukur dengan satuan rupiah (Rp) per tahun

Pengeluaran pangan adalah besarnya uang yang dikeluarkan dan barang yang dinilai dengan uang untuk konsumsi makanan semua anggota keluarga, yang diukur dalam satuan rupiah (Rp) per tahun

Pengeluaran untuk non pangan rumah tangga adalah jumlah pendapatan rumah tangga yang dialokasikan untuk kebutuhan non pangan yang dibeli oleh rumah tangga, dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp) per tahun.

Responden merupakan KPM PKH sebagai pengurus rumah tangga yang menerima bantuan sosial PKH dan bersedia diwawancarai.

Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik, tinggal bersama, dan biasanya makan bersama dari satu dapur atau seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik, tinggal bersama, yang memiliki satu manajemen keuangan.

KPM adalah ibu rumah tangga atau pengurus rumah tangga yang menerima bantuan sosial PKH dan termasuk kategori rumah tangga sangat miskin yang kategorinya sudah ditentukan oleh Basis Data Terpadu (BDT) dan harus melaksanakan persyaratan PKH serta sejumlah kegiatan dilakukan agar dapat

mengubah pola pikir dan perilaku yang mendukung pada peningkatan kualitas keluarga.

PKH adalah sebuah program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui bantuan *conditional cash transfer* dan biasa disebut bantuan sosial bersyarat dalam bentuk uang kepada keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai KPM PKH.

BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-waroeng yang bekerjasama dengan bank.

Pendamping sosial PKH adalah seseorang yang bertugas melaksanakan pendampingan KPM PKH di suatu wilayah dampingan, berfungsi sebagai fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi KPM PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta memastikan KPM memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan untuk perubahan perilaku melalui kegiatan P2K2.

P2K2/FDS adalah sebuah intervensi perubahan perilaku yang terstruktur yang diberikan pada semua KPM PKH sejak tahun pertama kepesertaan. Materi wajib disampaikan melalui pertemuan kelompok setiap bulan yang disampaikan oleh Pendamping Sosial PKH terhadap kelompok KPM tentang pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak dan pengasuhan lanjut usia dan disabilitas.

Pengetahuan KPM pada kegiatan P2K2/FDS adalah pengetahuan pada materi-materi P2K2/FDS yang terdapat dalam modul P2K2/FDS dan telah disampaikan oleh pendamping PKH kepada KPM PKH. Pengetahuan P2K2/FDS dihitung berdasarkan jumlah skor yang diperoleh terhadap jawaban dari kuesioner yang diberikan. Seluruh butir pertanyaan yang valid diintervalkan dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI) untuk keperluan analisis regresi. MSI yaitu metode konversi data yang digunakan untuk mengubah data ordinal menjadi data interval.

Pendidikan adalah tahapan pendidikan formal terakhir yang telah ditempuh oleh seseorang, yang dinyatakan dalam satuan tahun.

Pendidikan suami adalah tahapan pendidikan formal terakhir yang telah ditempuh suami (tahun suksesi).

Pendidikan istri adalah tahapan pendidikan formal terakhir yang telah ditempuh istri (tahun suksesi).

Usia adalah satuan waktu yang mengukur lamanya waktu keberadaan seseorang hidup di dunia ini, yang dinyatakan dalam satuan tahun.

Jumlah tanggungan keluarga adalah total anggota keluarga dapat terdiri dari istri dan anak, serta orang lain atau memiliki hubungan darah yang hidup bersama dalam keluarga atau hidup dalam satu rumah dan makan bersama yang menjadi tanggungan kepala keluarga (jiwa).

### **C. Lokasi Penelitian, Responden dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung dengan metode survei. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*). Pemilihan lokasi ditentukan dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Bumiwaras merupakan wilayah termiskin kedua di Kota Bandar Lampung dan Kecamatan Rajabasa memiliki penyandang kesejahteraan sosial yang berkarakteristik sama (BPS Kota bandar Lampung, 2019). Data fakir miskin di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Data banyaknya penyandang kesejahteraan sosial (fakir miskin) menurut kecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Fakir Miskin (jiwa)
1	Teluk Betung Barat	3.376
2	Teluk Betung Timur	3.806
3	Teluk Betung Selatan	3.136
<b>4</b>	<b>Bumiwaras</b>	<b>4.269</b>
5	Panjang	4.446
6	Tanjung Karang Timur	1.735
7	Kedamaian	2.106
8	Teluk Betung Utara	3.130
9	Tanjung Karang Pusat	2.655
10	Enggal	1.134
11	Tanjung Karang Barat	2.559
12	Kemiling	2.479
13	Langkapura	1.456
14	Kedaton	2.017
<b>15</b>	<b>Rajabasa</b>	<b>1.883</b>
16	Tanjung Senang	1.369
17	Labuhan Ratu	1.587
18	Sukarame	1.148
19	Sukabumi	2.763
20	Way Halim	2.612

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung (2019)

Responden penelitian adalah KPM PKH atau pengurus rumah tangga yang menetap di Kota Bandar Lampung dan telah menerima bantuan PKH. Menurut UPPKH Kota Bandar Lampung Tahun 2019 (tidak dipublikasikan), dijelaskan bahwa jumlah populasi KPM PKH di Kecamatan Rajabasa yaitu 1.342 orang. Jumlah populasi KPM PKH di Kecamatan Bumiwaras yaitu 2.911 orang. Berdasarkan data yang diperoleh, seluruh populasi KPM PKH dari Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Bumiwaras berjumlah 4.253 KPM PKH. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2S^2}{Nd^2 + Z^2S^2}$$

**Keterangan**

- n = Jumlah sampel
- N = Jumlah populasi
- S<sup>2</sup> = Variasi sampel (5% =0,05)
- Z = Tingkat kepercayaan (95%=1,96)
- d = Derajat penyimpangan (5%=0,05)

$$n = \frac{4.253 (1,96)^2 (0,05)}{4.253 (0,05)^2 + (1,96)^2 (0,05)}$$

$$n = \frac{816,92}{11,47} = 75,46 \text{ orang} = 76 \text{ orang}$$

Populasi rumah tangga dalam penelitian ini adalah 4.253 rumah tangga KPM PKH, yaitu dari Kecamatan Rajabasa sebanyak 1.342 KPM PKH dan Kecamatan Bumiwaras sebanyak 2.911 KPM PKH. Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh sampel sebanyak 76 KPM PKH. Penentuan sampel adalah salah satu rangkaian yang dilakukan dalam penelitian untuk mengambil sampel yang dapat mewakili populasi sebenarnya. Jumlah sampel per kelurahan diambil dengan metode *propotional random sampling*. Adapun menurut Mustafa (2009), penarikan sampel secara proporsional dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan:

- $n_i$  = sampel kecamatan  $i$
- $N_i$  = populasi kecamatan  $i$
- $N$  = jumlah populasi kecamatan  $i$
- $n$  = jumlah sampel kecamatan  $i$

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh jumlah sampel masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Rajabasa sebanyak 24 KPM PKH dan Kecamatan Bumiwaras sebanyak 52 KPM PKH. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode acak sederhana (*simple random sampling*). Waktu pengumpulan data dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus 2020.

#### **D. Jenis dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari lembaga/instansi yang

terkait dengan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, kuesioner dan wawancara dengan KPM PKH sebagai sumber data utama dalam penelitian. Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap obyek untuk keperluan pencarian data tentang KPM PKH di Kota Bandar Lampung. Instrumen berupa kuesioner berisi serangkaian pertanyaan yang dijabarkan dari variabel-variabel penelitian.

Kuesioner atau daftar pertanyaan digunakan mengarah kepada pendapatan dan pola pengeluaran KPM PKH di Kota Bandar Lampung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban responden yang lebih mendetail dari pertanyaan yang ada dengan menggunakan kuesioner. Wawancara dengan responden dilakukan secara langsung/tatap muka agar diperoleh jawaban yang dapat melengkapi pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Tatap muka dilakukan agar data yang diperoleh dari hasil wawancara lebih valid. Menurut Sugiyono (2011), diharapkan dengan menggunakan teknik pengumpulan di atas agar dapat saling melengkapi sehingga data yang dikumpulkan akurat, konsisten dan lengkap.

#### **E. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Metode analisis data dan pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan angka-angka dan data-data statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil yang didapatkan dari analisis kuantitatif. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran umum tentang data yang telah diperoleh atau hasil pengamatan yang telah dilakukan. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis pendapatan KPM PKH, pengeluaran dan pola pengeluaran KPM PKH. Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode tabulasi dan komputasi. Adapun cara untuk menjawab beberapa tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode pengolahan data yaitu:

## 1. Pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

Pendapatan KPM diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan keluarga yang berasal dari penghasilan utama rumah tangga, pendapatan dari bantuan PKH, pendapatan dari bantuan BPNT dan pendapatan lainnya (sampingan). Berdasarkan perhitungan tersebut maka akan diperoleh rata-rata pendapatan rumah tangga dalam satu tahun. Untuk mengetahui pendapatan rumah tangga digunakan rumus sebagai berikut:

$$TP = P_{rtKPM} + P_{PKH} + P_{BPNT} + P_{II}$$

Keterangan:

TP = pendapatan rumah tangga KPM PKH (Rupiah) per tahun

$P_{rtKPM}$  = pendapatan utama KPM dari kegiatan sehari-hari suami istri (Rupiah) per tahun

$P_{PKH}$  = pendapatan dari bantuan PKH (Rupiah) per tahun

$P_{II}$  = pendapatan lainnya (Rupiah) per tahun

Proporsi pendapatan dari pendapatan utama terhadap total pendapatan rumah tangga KPM PKH dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$PrP_{uKPM} = \frac{P_{rtKPM}}{TP} \times 100\%$$

Keterangan:

$PrP_{uKPM}$  = Proporsi pendapatan dari pekerjaan utama suami istri (%)

$P_{rtKPM}$  = pendapatan utama KPM dari kegiatan sehari-hari suami istri (Rupiah) per tahun

TP = Total pendapatan rumah tangga KPM PKH (Rupiah) per tahun

Proporsi pendapatan bantuan PKH terhadap total pendapatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$PrP_{PKH} = \frac{P_{PKH}}{TP} \times 100\%$$

Keterangan:

$PrP_{PKH}$  = Proporsi pendapatan dari bantuan PKH (%)

$P_{PKH}$  = pendapatan dari bantuan PKH (Rupiah) per tahun

TP = Total pendapatan rumah tangga KPM PKH (Rupiah) per tahun

Proporsi pendapatan bantuan BPNT terhadap total pendapatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{PrP}_{\text{BPNT}} = \frac{P_{\text{BPNT}}}{\text{TP}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\text{PrP}_{\text{PKH}}$  = Proporsi pendapatan dari bantuan BPNT (%)

$P_{\text{PKH}}$  = pendapatan dari bantuan BPNT (Rupiah) per tahun

TP = Total pendapatan rumah tangga KPM PKH (Rupiah) per tahun

Proporsi pendapatan dari kegiatan lainnya (sampingan) terhadap total pendapatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{PrP}_{\text{II}} = \frac{P_{\text{II}}}{\text{TP}} \times 100\%$$

Keterangan:

$P_{\text{uKPM}}$  = Proporsi pendapatan dari usaha lainnya (%)

$PP_{\text{II}}$  = pendapatan lainnya (Rupiah)

TP = Total pendapatan rumah tangga KPM PKH (Rupiah) per tahun

## 2. Analisis Pengeluaran Rumah Tangga KPM PKH

Pengeluaran rumah tangga adalah nilai yang dikeluarkan untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam tempo waktu tertentu. Total pengeluaran rumah tangga KPM PKH dapat diketahui dengan menghitung pengeluaran pangan dan non pangan. Rumus yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat di bawah (Amaliyah, 2011).

$$\text{TPI} = \text{Pf} + \text{Pnf}$$

Keterangan:

TPI = Total pengeluaran rumah tangga KPM PKH (Rupiah) per tahun

Pf = Pengeluaran pangan (Rupiah) per tahun

Pnf = Pengeluaran non pangan (Rupiah) per tahun

Pada rincian perhitungan pengeluaran rumah tangga berdasarkan kriteria sajogyo (1997) terbagi menjadi pengeluaran pangan dan non pangan dan dilakukan dengan cara menghitung kebutuhan harian, mingguan dan bulanan. Pengeluaran pangan menurut Badan Ketahanan Pangan Daerah (2014) dibagi menjadi sembilan



kelompok, yaitu kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain. Pengeluaran non pangan dibagi menjadi delapan kelompok, yaitu kelompok pendidikan, kesehatan, sandang, perumahan, transportasi, telekomunikasi, perlengkapan mandi dan cuci, lain-lain. Pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan rumah tangga KPM PKH dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$C_t = C_{pi} + C_{npi}$$

Keterangan:

$C_p$  = total pengeluaran rumah tangga KPM PKH (Rupiah) per tahun

$i$  = 1, 2, 3, ..... n

$n$  = pengeluaran lainnya

$C_p$  = total pengeluaran pangan (Rupiah) per tahun, dengan rumus:

$C_p = C_{pp} + C_{uu} + C_{ph} + C_{ml} + C_{bb} + C_{kk} + C_{gl} + C_{sb} + \dots + C_{ll}$

$C_{pp}$  = pengeluaran untuk padi-padian (Rupiah) per tahun

$C_{uu}$  = pengeluaran untuk umbi-umbian (Rupiah) per tahun

$C_{ph}$  = pengeluaran untuk pangan hewani (Rupiah) per tahun

$C_{ml}$  = pengeluaran untuk minyak dan lemak (Rupiah) per tahun

$C_{bb}$  = pengeluaran untuk biji-bijian (Rupiah) per tahun

$C_{kk}$  = pengeluaran untuk kacang-kacangan (Rupiah) per tahun

$C_{gl}$  = pengeluaran untuk gula (Rupiah) per tahun

$C_{sb}$  = pengeluaran untuk sayur dan buah (Rupiah) per tahun

$C_{ll}$  = pengeluaran untuk lain-lain pada bumbu dan rokok (Rupiah) per tahun

$C_{np}$  = total pengeluaran non pangan (Rupiah) per tahun, dengan rumus:

$C_{np} = C_{pn} + C_k + C_s + C_{pr} + C_{tr} + C_{tl} + C_{pl} + C_{ll}$

$C_{pn}$  = pengeluaran pendidikan (Rupiah) per tahun

$C_k$  = pengeluaran untuk kesehatan (Rupiah) per tahun

$C_s$  = pengeluaran untuk sandang (Rupiah) per tahun

$C_{pr}$  = pengeluaran untuk perumahan (Rupiah) per tahun

$C_{tr}$  = pengeluaran untuk transportasi (Rupiah) per tahun

$C_{tl}$  = pengeluaran untuk telekomunikasi (Rupiah) per tahun

$C_{pl}$  = pengeluaran untuk perlengkapan mandi atau cuci (Rupiah) per tahun

$C_{ll}$  = pengeluaran untuk lain-lain (Rupiah) per tahun

Proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total rumah tangga KPM PKH dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$PrPF = \frac{PP}{TPI} \times 100\%$$

Keterangan:

$PrPF$  = Proporsi pengeluaran pangan (%)

$PP$  = Pengeluaran pangan (Rupiah) per tahun

$TPI$  = Total pengeluaran (Rupiah) per tahun

Proporsi pengeluaran non pangan terhadap pengeluaran total rumah tangga KPM PKH dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{PrPF} = \frac{\text{PNP}}{\text{TPI}} \times 100\%$$

Keterangan:

PrPF = Proporsi pengeluaran non pangan (%)

PNP = Pengeluaran non pangan (Rupiah) per tahun

TPI = Total pengeluaran (Rupiah) per tahun

Menurut indikator BPS (2020), pengukuran tingkat kemiskinan dapat dihitung dari pengeluaran per kapita per bulan dengan melihat garis kemiskinan (GK).

Garis kemiskinan adalah indikator perbandingan untuk menilai tingkat kemiskinan penduduk dengan membandingkannya terhadap total pengeluaran penduduk per kapita per bulan. Garis Kemiskinan dihasilkan melalui penjumlahan antara garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan, dengan satuan rupiah per kapita per bulan (Rp/kapita/bulan). Garis kemiskinan di Provinsi Lampung pada September 2020 sebesar Rp457.495,00/kapita/bulan (BPS, 2020). Garis kemiskinan di Kota Bandar Lampung pada September 2019 sebesar Rp558.117,00/kapita/bulan (BPS, 2019).

Tingkat kemiskinan dapat dirumuskan:

$$\text{GK} = \text{GKM} + \text{GKBM}$$

Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKBM = Garis Kemiskinan Bukan Makanan

BPS dalam mengukur kemiskinan selain dengan menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar juga mengukur kemiskinan dengan melihat persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan untuk melihat seberapa besar tingkat kemiskinan di suatu masyarakat. Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Persentase penduduk miskin dapat dirumuskan:

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^a$$

Keterangan:

- a = 0
- $P_0$  = Presentase penduduk miskin
- $P_1$  = Indeks kedalaman kemiskinan
- $P_2$  = Indeks keparahan kemiskinan
- z = Garis kemiskinan
- $y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i=1,2,3,\dots,q$ );  $y_i < z$
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- n = Jumlah penduduk (BPS, 2020)

Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan dirumuskan :

$$P_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^a$$

Keterangan:

- a = 1
- $P_0$  = Presentase penduduk miskin
- $P_1$  = Indeks kedalaman kemiskinan
- $P_2$  = Indeks keparahan kemiskinan
- z = Garis kemiskinan
- $y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i=1,2,3,\dots,q$ );  $y_i < z$
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- n = Jumlah penduduk (BPS, 2020)

Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan dirumuskan :

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^a$$

Keterangan:

a = 2

$P_0$  = Presentase penduduk miskin

$P_1$  = Indeks kedalaman kemiskinan

$P_2$  = Indeks keparahan kemiskinan

z = Garis kemiskinan

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i=1,2,3,\dots,q$ );  $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk (BPS, 2020).

### 3. Determinan pengeluaran

Tujuan ketiga untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga KPM PKH di Kota Bandar Lampung, berdasarkan penelitian terdahulu, diambil beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengeluaran, yaitu pendapatan, usia suami, usia istri, pendidikan suami, pendidikan istri, jumlah anggota keluarga dan peran P2K2 atau FDS. Analisis ini terdiri dari satu variabel terikat dan enam variabel bebas. Variabel yang akan diteliti lebih dari dua variabel, maka alat analisis yang digunakan adalah metode regresi linier berganda atau *Ordinary Least Square (OLS)*.

Sebelum variabel dianalisis, penentuan variabel peran P2K2 atau FDS ( $X_6$ ) diukur dengan menggunakan seperangkat pertanyaan tertutup dengan tiga alternatif jawaban, jawaban KPM tentang pengetahuan peran kegiatan P2K2 atau FDS pada program PKH yang yang paling tepat diberi skor 2, jawaban yang kurang tepat diberi skor 1 dan jawaban yang tidak tepat diberi skor 0. Sebelum dilakukan analisis terhadap indikator yang telah dilakukan maka perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada instrumen yang digunakan dalam penelitian. Menurut Mustafa (2009), uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukur dan mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner, sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama.

Menurut Ghozali (2006), cara pengujiannya yaitu dengan mengkorelasikan tiap-tiap atribut yang ada. Apabila secara statistik signifikan, maka atribut tersebut valid dan sebaliknya jika tidak signifikan maka atribut tersebut tidak digunakan

dalam penelitian atau tidak valid. Menurut Arikunto (2002) pengujian validitas kuesioner variabel yang dinyatakan valid memiliki angka korelasi  $\geq 0,351$  dengan taraf kepercayaan sebesar 5 persen. Validitas variabel dapat dihitung berdasarkan korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan rumus:

$$r_{\text{hit}} = \frac{n (\sum XiYi) - (\sum Xi)x(\sum Yi)}{\sqrt{\{(n \sum Xi^2) - (\sum Xi)^2\} \times \{(n \sum Yi^2) - (\sum Yi)^2\}}}$$

Keterangan:

- r = koefisien korelasi (validitas)
- X = skor pada subjek item n
- Y = skor total subjek
- XY = skor pada subjek item n dikali skor total
- n = banyaknya subjek

Uji validitas menggunakan *construct validity*. Uji validitas dilakukan dengan melihat *corrected item-total* dari korelasi *product moment* antara butir pertanyaan yang akan diuji dan total bulir pertanyaan.

Jika r hasil > r tabel, maka bulir tersebut valid

Jika r hasil < r tabel, maka butir tersebut tidak valid

Uji reliabilitas untuk mengetahui keandalan bulir pertanyaan yang diajukan pada KPM PKH dalam kuesioner. Menurut Ghozali (2006) reliabilitas digunakan untuk mengetahui keandalan dari atribut-atribut yang diajukan dalam kuesioner. Kuesioner yang telah diuji reliabilitas apabila digunakan pada lokasi dan waktu yang berbeda maka akan memperoleh hasil yang sama. Cara mengujinya yaitu dengan koefisien korelasi yang dibagi kedalam dua grup. Total skor seluruh atribut grup pertama dikorelasikan dengan (*product moment correlation*) dengan grup kedua. Apabila secara statistik signifikan maka reliabel dan sebaliknya. Uji reliabilitas menggunakan *one shot*. Perhitungan reliabilitas dapat menggunakan rumus *cronbach-alpha*:

$$A = \left[ \frac{k^2}{k-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma^2} \right]$$

Keterangan:

- a = koefisien reliabilitas alpha
- k = jumlah item
- $\sum \sigma_i^2$  = jumlah varians skor total
- $\sigma_i$  = varians responden untuk item i

dimana jika alpha atau r hitung:

- (a) 0,8 - 1,0 = reliabilitas baik
- (b) 0,6 - 0,79 = reliabilitas diterima
- (c) < 0,6 = reliabilitas kurang baik

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat *cronbach alpha* apabila

Jika  $\alpha$  positif dan  $> r$  tabel, maka butir tersebut reliabel

Jika  $\alpha$  positif tetapi  $< r$  tabel, maka butir tersebut tidak reliabel

Kuesioner belum dapat digunakan sebelum dilakukannya uji validitas dan reliabilitas pada butir pertanyaan dalam penelitian. Pada penelitian ini pengujian dilakukan pada 30 responden pertama. Hasil uji validitas dan reliabilitas pengetahuan KPM tentang kegiatan FDS/P2K2 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil uji validitas dan reliabilitas pengetahuan KPM pada kegiatan FDS/P2K2

Bulir pertanyaan ke-	Uji validitas	Uji reliabilitas	Kesimpulan
	Corrected item-total correlation	Cronbach's alpha	
1. Inti materi FDS/P2K2	<b>0,348</b>	0,920	<b>Tidak valid</b>
2. Metode yang dilakukan dalam penyampaian materi	0,597		valid
3. Keaktifan dalam keikutsertaan kegiatan FDS/P2K2 dan frekuensi ikut serta dalam kegiatan	0,667		valid
4. KPM mempraktikkan materi yang telah disampaikan di rumah	0,503		valid
5. Manfaat kegiatan FDS/P2K2	0,755		valid
6. Perbedaan keinginan dan kebutuhan beserta contohnya	0,727		valid
7. Kewajiban orangtua terhadap anak dan perlakuan seperti apa yang tidak boleh dilakukan kepada anak	0,728		valid
8. Disabilitas dan cara merawatnya	0,759		valid
9. Lansia dan cara merawatnya	0,740		valid
10. Kewajiban dari ibu hamil dan menyusui	0,810		valid
11. Eksploitasi anak dan contohnya	0,809		valid
12. Penelantaran anak dan perlakuan seperti apa yang seharusnya diberikan kepada anak	0,832		valid

Berdasarkan Tabel 6 diatas, hasil uji pertama diperoleh nilai korelasi di bawah r tabel (tidak valid) pada pertanyaan butir 1. Uji ini dilakukan dengan cara mengeluarkan satu persatu butir yang tidak valid dan terkecil (tabel terlampir). Pertanyaan pada butir 1 dikeluarkan dari pengukuran karena tidak valid. Setelah dikeluarkan, hasil uji selanjutnya dinyatakan seluruh variabel valid. Adapun hasil akhir uji validitas dan reliabilitas pengetahuan KPM pada kegiatan FDS/P2K2 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil akhir uji validitas dan reliabilitas pengetahuan KPM pada kegiatan FDS/P2K2

Bulir pertanyaan ke-	Uji validitas	Uji reliabilitas	Kesimpulan
	Corrected item-total correlation	Cronbach's alpha	
2. Metode yang dilakukan dalam penyampaian materi	0,564	0,924	valid
3. Keaktifan dalam keikutsertaan kegiatan FDS/P2K2 dan frekuensi ikut serta dalam kegiatan	0,653		valid
4. KPM mempraktikkan materi yang telah disampaikan di rumah	0,516		valid
5. Manfaat kegiatan FDS/P2K2	0,743		valid
6. Perbedaan keinginan dan kebutuhan beserta contohnya	0,700		valid
7. Kewajiban orangtua terhadap anak dan perlakuan seperti apa yang tidak boleh dilakukan kepada anak	0,732		valid
8. Disabilitas dan cara merawatnya	0,756		valid
9. Lansia dan cara merawatnya	0,737		valid
10. Kewajiban dari ibu hamil dan menyusui	0,833		valid
11. Eksploitasi anak dan contohnya	0,834		valid
12. Penelantaran anak dan perlakuan seperti apa yang seharusnya diberikan kepada anak	0,845		valid

Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa hasil uji validitas untuk sebelas butir pertanyaan pengetahuan KPM dari kegiatan FDS/P2K2 yang terdapat pada kuesioner dinyatakan valid karena nilai yang diperoleh masing-masing variabel indikator lebih dari r tabel. Pengujian reliabilitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan *cronbach's alpha*. Hasil uji reliabilitas diperoleh 0,924 yang

artinya pengujian reliabilitas diterima karena nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari r tabel. Hal ini berarti pengukuran dengan pengumpulan data yang dilakukan dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya.

Setelah kuesioner pengetahuan KPM tentang Kegiatan FDS atau P2K2 diuji validitas dan reliabilitasnya, variabel-variabel dianalisis dengan metode OLS, pengeluaran berlaku sebagai variabel terikat (Y) dalam Rp dan sebagai variabel bebas (X) adalah pendapatan rumah tangga ( $X_1$ ) dalam Rp, usia KPM ( $X_2$ ) dalam tahun, pendidikan suami ( $X_3$ ) dalam tahun sukses, pendidikan istri ( $X_4$ ) dalam tahun sukses, jumlah anggota keluarga ( $X_5$ ) dalam jiwa dan peran P2K2 atau FDS ( $X_6$ ) dalam skor. Secara umum model persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Dimana:

- Y = total pengeluaran rumah tangga (rupiah per tahun)
- $\beta_0$  = intersep
- $\beta_1, \dots, \beta_6$  = koefisien regresi
- $X_1$  = pendapatan (juta Rp/tahun)
- $X_2$  = usia (tahun)
- $X_3$  = pendidikan suami (tahun sukses)
- $X_4$  = pendidikan istri (tahun sukses)
- $X_5$  = jumlah anggota keluarga (jiwa)
- $X_6$  = pengetahuan peran kegiatan P2K2 atau FDS (skor dikonversikan dengan menggunakan MSI)
- e = standar eror

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner.

Asumsi dalam pelaksanaan operasi regresi linier berganda adalah:

- a. Rata-rata kesalahan pengganggu (U) sama dengan nol; ( $E(U_i) = 0$ )
- b. Varians ( $U_i$ ) adalah konstan atau homokedastis
- c. Tidak ada autokorelasi dalam ( $U_i$ )
- d. Variabel bebas (X):
  1. Nonstokastis (tetap ada sampling yang berulang)
  2. Bila stokastis distribusi bebas dari ( $U_i$ )
- e. Tidak ada multikolinieritas antara variabel-variabel bebas



- f. ( $U_i$ ) terdistribusi normal dengan rata-rata dan varians seperti asumsi poin satu dan dua
- g. Model regresi terspesifikasi dengan benar

a) Uji Asumsi Klasik

Hasil perhitungan pada analisis linier berganda akan diuji agar tidak menghasilkan persamaan yang bias, maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdapat dalam model regresi. Uji asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas, multikolinieritas dan heterokedastis. Menurut Gujarati (2006), adapun kaidah pengujiannya adalah sebagai berikut.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji normalitas dapat dilihat berdasarkan hasil pola yang terbentuk dari grafik histogram dan p-plot. Namun untuk lebih meyakinkan uji normalitas pada data, maka uji normalitas digunakan dengan menggunakan uji Kolmogorov-smirnov test. Dikatakan normal apabila nilai signifikansinya  $> 0,05$ , begitu juga sebaiknya apabila tingkat signifikansinya  $< 0,05$  berarti tidak normal. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov test* diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,057. Pada hasil uji normalitas tersebut,  $0,057 > 0,05$  maka data tersebut dapat dikatakan normal.

2) Uji Multikolinieritas

Tujuan dilakukan uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel bebas. Jika variabel-variabel independen saling berkorelasi (di atas 0,9) dan nilai  $R^2$  sebagai ukuran *goodness of fit* yang dihasilkan oleh estimasi model regresi empiris sangat tinggi, dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)  $> 10$  maka mengindikasikan adanya multikolinieritas. Multikolinieritas dapat diperbaiki dengan melakukan penghilangan pada variabel yang berkorelasi tinggi. Pada penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan dengan bantuan program SPSS 22.00. Pada hasil uji

asumsi klasik yang telah dilakukan, nilai VIF yang dihasilkan dari tiap variabel kurang dari 10 dan nilai *tolerance value* > 0,1 sehingga antar variabel tidak berkorelasi tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinieritas.

### 3) Uji Heteroskedastis

Heteroskedastisitas dapat muncul jika terdapat kesalahan atau residual dari model yang diamati dan tidak memiliki varians yang konstan pada satu observasi dengan observasi lain, artinya pada tiap observasi memiliki reliabilitas yang berbeda diakibatkan oleh perubahan dalam kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model. Jika titik-titik tersebar di atas atau di bawah dengan tidak membentuk suatu pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat pada gambar Scatterplot SPSS, namun agar lebih jelas, uji heteroskedastis dilakukan dengan bantuan program Eviews dengan menggunakan uji *white* heteroskedastis. Hasil output pada uji *white* heteroskedastis menunjukkan nilai *Obs \*R-squared* adalah sebesar 10,875, sedangkan nilai *probabilitas(chi-square)* adalah 0,092 (lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$ ), dengan demikian hipotesis nol diterima. Hipotesis tersebut berarti tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

### b) Uji *Goodness of Fit*

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas pada variabel terikat, maka dilakukan uji t dan uji F. Pengambilan keputusan dengan uji t dan uji F menggunakan taraf kepercayaan 90 % atau dengan menggunakan taraf nyata  $\alpha$  0,01.

### 1) Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Gujarati (2006), koefisien determinan ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi-variabel independen.  $R^2$  bertujuan agar dapat melihat tingkat ketepatan paling baik dalam analisis regresi. Hal ini dapat ditunjukkan pada besarnya  $R^2$  yaitu

antara nol dan satu. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat dijelaskan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.  $R^2$  dari nol variabel independen yaitu sama sekali tidak memiliki pengaruhnya pada variabel dependen. Selain itu,  $R^2$  juga digunakan agar mengetahui persentase perubahan pada variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Regresi (ESS)}}{\text{Jumlah Kuadrat Total (TSS)}}$$

$R^2$ -adjusted pada regresi berganda merupakan nilai  $R^2$  yang telah disesuaikan terhadap banyaknya variabel bebas dan banyaknya observasi. Koefisien determinasi yang disesuaikan dirumuskan sebagai berikut:

$$R^2 \text{ adjusted} = \frac{\text{Kuadrat Tengah Sisa}}{\text{Kuadrat Tengah Total}}$$

## 2) Uji F (over all test)

Untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat digunakan uji F. Uji F atau yang biasa di sebut dengan uji simultan adalah penuji parameter keseluruhan yang dimaksudkan agar menguji apakah seluruh variabel bebas yang ada di dalam model dapat berpengaruh nyata terhadap pola pengeluaran apabila digunakan secara bersama-sama. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan F-hitung dengan F-tabel. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut.

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_6 = 0$$

$H_0: \beta_i = 0$ , artinya variabel bebas ( $X_1, X_2, \dots, X_6$ ) tidak ada pengaruh nyata secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_a$ : salah satu  $\beta_i \neq 0$ , artinya secara bersama sama ( $X_1, X_2, \dots, X_6$ ) ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Menurut Gujarati (2006), uji statistik pada uji F menggunakan rumus di bawah.

$$F_{\text{hit}} = \frac{ESS/(k - 1)}{RSS/(n - k)}$$

Keterangan:

ESS = jumlah kuadrat regresi

RSS = jumlah kuadrat sisa

k = variabel

n = jumlah responden

Adapun kaidah pengujiannya adalah sebagai berikut.

Jika  $F_{\text{hit}} \leq F_{\text{tabel}}$ , maka terima  $H_0$ , artinya variabel bebas ( $X_1, X_2, \dots, X_6$ ) secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

Jika  $F_{\text{hit}} > F_{\text{Tabel}}$  maka tolak  $H_0$ , artinya variabel bebas ( $X_1, X_2, \dots, X_6$ ) secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

### 3) Uji terhadap penduga parameter (t-test)

Pengujian variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan untuk mengetahui apakah tiap-taip variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat yang dikenal dengan Uji-t atau uji parsial. Hipotesis yang digunakan yaitu.

$H_0: \beta_i = 0$ , artinya tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

$H_0: \beta_i \neq 0$ , artinya ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Menurut Gujarati (2006), uji statistik yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$T_{\text{hit}} = \frac{b_i}{s_{b_i}}$$

Keterangan:

$b_i$  = koefisien regresi suatu variabel bebas

$s_{b_i}$  = simpangan baku

Adapun Kaidah pengujian Uji t pada persamaan sebagai berikut.

Jika  $t_{\text{hit}} \leq t_{\text{tabel}}$ , maka terima  $H_0$ , artinya variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

Jika  $t_{\text{hit}} > t_{\text{tabel}}$  maka tolak  $H_0$ , artinya variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

- (1) Rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar Rp30.708.421,05 per rumah tangga per tahun atau setara dengan Rp2.559.035,09 per bulan yang bersumber dari pendapatan suami (67 persen), pendapatan istri (16 persen), pendapatan sampingan (2 persen), bantuan PKH (10 persen) dan bantuan BPNT (5 persen).
- (2) Pola pengeluaran rumah tangga KPM PKH di Kota Bandar Lampung yaitu pengeluaran pangan sebesar Rp13.731.487,00 per tahun (50,64 persen) lebih besar daripada pengeluaran non pangan sebesar Rp13.368.059,00 per tahun (49,36 persen).
- (3) Determinan pengeluaran rumah tangga KPM PKH di Kota Bandar Lampung yaitu pendapatan ( $X_1$ ), pendidikan KPM PKH ( $X_4$ ) dan jumlah anggota keluarga ( $X_5$ ).

### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah

- (1) Perlu dilakukan pendidikan non formal oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana program mengenai bahaya dan dampak nikotin terkait pengeluaran rokok yang tinggi pada KPM PKH di Kota Bandar Lampung, kemudian bagi rumah tangga KPM PKH sebaiknya mengurangi pengeluaran rokok dan dialihkan untuk pengeluaran lain seperti jenis pengeluaran pangan maupun non pangan.

- (2) Bagi peneliti lain disarankan untuk melakukan penelitian sejenis dengan menambahkan variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian untuk mengetahui determinan pengeluaran KPM PKH seperti budaya, lingkungan dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achadi EL, Thaha AR, Achadi A, Syam AF, Setiarini A, Utari DM, Tahapary DL, Jalal F, Puspongoro HL, dkk. 2020. *Pencegahan Stunting Pentingnya Peran 1000 Hari Pertama Kehidupan*. Depok. PT Rajagrafindo Persada.
- Ahsan A. 2009. *Peningkatan Cukai Tembakau dan Dampak Perekonomian*. TCSC-IAKMI. Jakarta.
- Alpharesy MA, Anna Z dan Yustiati A. 2012. Analisis Pendapatan dan Pola Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan Buruh di Wilayah Pesisir Kampak Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*. Vol 3(1):11-16. [Http://jurnal.unpad.ac.id/](http://jurnal.unpad.ac.id/).
- Amaliyah H dan Handayani SM. 2011. Analisis Hubungan Proporsi Pengeluaran dan Konsumsi Pangan dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi di Kabupaten Klaten. *SEPA*. Vol. 7(2): 110-118. [Https://agribisnis.fp.uns.ac.id/](https://agribisnis.fp.uns.ac.id/).
- Annisa A dan Yulindasari H. 2020. Family Development Session of the Indonesian Family Welfare Program. *Proceedings of the 5th International Conference on Early Childhood Education (ICECE 2020)*. Vol 538:(611-66). [Https://www.atlantis-press.com/proceedings/icece-20/125954484](https://www.atlantis-press.com/proceedings/icece-20/125954484)
- Arikunto S. 2002. *Metode Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Azizi A, Manadiyanto, dan Koeshendrajana S. 2011. Pendapatan dan Pola Pengeluaran Konsumsi Petambak Garam di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. *Jurnal Sosek Kelautan dan Perikanan*. Vol 6 (2): 205-219. [Https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/](https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/).
- Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. 2014. *Roadmap Diversifikasi Pangan 2011-2015*. BKPD. Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Sosialisasi Pendataan Program Perlindungan Sosial 2015*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Lampung Dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Bandar Lampung.

- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Lampung Dalam Angka 2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Bandar Lampung.
- Bahrin, Syaparuddin dan Hardiani. 2013. Analisis Pendapatan dan Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol 2(1): 1-8. <https://online-journal.unja.ac.id/>.
- Bradshaw TK. 2005. Theories of Poverty and Anti Poverty Program in Community Development. *Community Development: Jurnal of the Community Development Society*. Vol 38(1):7-25. <https://www.tandfonline.com/>
- Bungkaes HR, Posumah JH dan Kiyai B. 2013. Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Acta Diurna*. Vol. 2 (2) :1-23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/view/1380>.
- Cooper DR dan Emroy W. 1996. *Metode Penelitian Bisnis, Terjemahan Edisi Kelima*. Erlangga. Jakarta.
- Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2013. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta. Kementerian Sosial.
- Dumiary. 2004. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Faisal S. 2001. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Faradina R, Iskandarini, Lubis SN. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat). *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social and Arts*. Vol. 1 (1): 248-295. <https://talentaconfseries.usu.ac.id/>.
- Fatimah N dan Syamsiyah N. 2018. Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga Petani Padi di Desa Patimban Kecamatan Pusanagara Kabupaten Subang, Jawa Barat. *Jurnal pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. Vol. 4(2):184-196. <https://jurnal.unigal.ac.id/>
- Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.



- Gujarati. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Hariani S, Yustikasari Y dan Akbar T. 2019. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Cengkareng Barat Wilayah Jakarta Barat. *Berdaya: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 1(1):15-22. [Http://ejournal.imperiuminstitute.org/](http://ejournal.imperiuminstitute.org/).
- Hasibuan LS dan Lestari R. 2016. Analisis Pola pengeluaran Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekonomikawan*. Vol. 16(1):38-55. [Http://jurnal.umsu.ac.id/](http://jurnal.umsu.ac.id/).
- Hidayat A. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Margahayu. *Public Administration Journal*. Vol. 2 (2):212-231. [Http://journal.moestopo.ac.id/](http://journal.moestopo.ac.id/).
- Hikmat RH. 2017. *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2017*. Padang. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Hildayanti SK, Jenahar TJ dan Oemar H. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Rumah Tangga Petani Karet di Kabupaten Banyuwangi Sumatera Selatan. *Jurnal Ecoment Global*. Vol. 2 (2):57-62. [Http://ejournal.uigm.ac.id/](http://ejournal.uigm.ac.id/).
- Humaidi E, Amin Z dan Suryati N. 2015. Pola Pengeluaran Rumah Tangga Petani Karet di Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi. *Societa*. Vol. 4 (1): 54-58. [Http://jurnal.societa.ac.id/](http://jurnal.societa.ac.id/).
- Illahi N, Adry MR dan Triani M. 2018. Analisis Determinan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia. *EcoGen*. Vol. 1 (3):549-556. [Https://ejournal.unp.ac.id/](https://ejournal.unp.ac.id/).
- Iskandar. 2017. Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Langsa. *Jurnal Samudera Ekonomika*. Vol. 1(2):127-134. [Https://ejurnalunsam.id/](https://ejurnalunsam.id/).
- Kementerian Sosial. 2019. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Jakarta.
- Kepala Biro Hukum Dan Kemensos. 2017. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan*. Kepala Biro Hukum Dan Kemensos. Jakarta
- Kepala Biro Hukum dan Kemensos. 2017. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan*. Kepala Biro Hukum dan Kemensos. Jakarta.

- Kholif KI, Noor I, Siswidiyanto. 2014. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2 (4): 709-714. [Http://administasipublik.studentjournal.ub.ac.id/](http://administasipublik.studentjournal.ub.ac.id/).
- Lembaga Negara Indonesia. 2017. *Peraturan Presiden Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*. Lembaga Negara Indonesia. Jakarta.
- Mantra. IB. 2004. *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Martianto D dan Arini M. 2004. *Analisis Perubahan Konsumsi dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dalam Dekade Terakhir*. Widyakarya Nasional Pangan Gizi VIII “Ketahanan Pangan di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi. Jakarta.
- Mosher. 1987. *Menciptakan Struktur Pedesaan Progresif*. Disunting oleh Rochim Wirjoniodjojo. Yasaguna. Jakarta.
- Mustafa Z. 2009. *Mengukur Variabel hingga Instrrumentasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Oktaprawati S, Haryono D dan Adawiyah R. 2018. Analisis Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Petani Kakao di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. *JIIA (Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis)*. Vol. 6(1):9-16. [Http://jurnal.fp.unila.ac.id/](http://jurnal.fp.unila.ac.id/).
- Pedoman Umum PKH. 2019. *Pedoman Umum PKH Tahun 2019*. Jakarta. Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, Departemen Sosial RI.
- Pitomo S. 1992. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Yayasan Ilmu-ilmu Sosial: Jakarta.
- Prianti E, Arifin B dan Nugraha A. 2017. Peran Kebijakan Raskin terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Penerima Raskin di Kota Bandar Lampung. *JIIA (Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis)*. Vol. 5(4):352-359. [Http://jurnal.fp.unila.ac.id/](http://jurnal.fp.unila.ac.id/).
- Purwaningsih Y, Hartono S, Masyhuri dan Mulyo JH. 2010. Pola Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Menurut Tingkat Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 11(2): 236-253. [Http://journals.ums.ac.id/](http://journals.ums.ac.id/).
- Purwanto A dan Taftazani BM. 2018. Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L Universitas Padjadjaran. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol.1(2):33-43. [Https://jurnal.unpad.ac.id/](https://jurnal.unpad.ac.id/)

- Purwanto SA, Sumartono, Makmur M. 2013. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 16 (2):79-96. [Http://wacana.ub.ac.id/](http://wacana.ub.ac.id/).
- Handewi, Rachman PS dan Supriyati. 2004. Pola Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga Kasus Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. *Agro-Ekonometrika*. Vol 2(1). [Ejournal.uksw.edu](http://ejournal.uksw.edu)
- Rahardja, Pratama, Manurung M. 2005. *Teori Ekonomi Makro*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Remi, Soemitro S dan Tjiptoherijanto P. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Riskesdas. 2018. *Laporan Provinsi Lampung Riskesdas Tahun 2018*. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jakarta.
- Rizkillah R dan Simajuntak M. 2018. Allocation of Expenditure of Poor Family as a Recipient of Program Keluarga Harapan (PKH). *Journal of Family Sciences*. Vol.3 (01):41-52. [Http://jurnal.ipb.ac.id/](http://jurnal.ipb.ac.id/).
- Rochman G. 2013. *Indikator Pembangunan yang Menggerakkan*. Jakarta. Kompas.
- Rodjak. 2002. *Manajemen Usahatani*. Penerbit Pustaka Giratuna. Bandung.
- Rosiana W dan Saskara IAN. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Rumah Tangga Pekerja Wanita yang Bekerja di Industri Laundry Rumah Tangga di Kecamatan Denpasar Selatan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* Vol. 7 (11):2357-2388. [Https://ojs.unud.ac.id/](https://ojs.unud.ac.id/).
- Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kota Bandar Lampung. 2019. *Data Program Keluarga Harapan Kota Bandar Lampung (Tidak dipublikasikan)*. UPPKH Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung.
- Sahudini MS, Yunus L dan Zani M. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Petani Cengkeh di Desa Totallang Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Imiah Membangun Desa dan Pertanian*. Vol. 4 (3):66-72. [Http://ojs.uho.ac.id/](http://ojs.uho.ac.id/).
- Sari H, Syahnur S dan Seftaria C. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Rokok pada Rumah Tangga Miskin di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 3(2):117-133. [Http://jurnal.unsiyah.ac.id/](http://jurnal.unsiyah.ac.id/).
- Sajogyo. 1977. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Bogor: LPSP.

- Selian DA dan Jannah M. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Rumah Tangga Keluarga Miskin di Desa Tertinggal Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 3(1):1-20. <https://journal.iainlangsa.ac.id/>.
- Simanjuntak M, Puspitawati H, dan Djamaludin MD. 2010. Karakteristik Demografi, Sosial dan Ekonomi Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmu keluarga dan Konsumen*. Vol. 3(2):101-113. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/5190/3582>.
- Simbolon FJ. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Medan Tuntungan. *Methodargo: Jurnal Penelitian Ilmu Pertanian*. Vol. 2 (2):63-71. <http://www.ojs.lppmmethodistmedan.net/index.php/>.
- Sinaga dan Ilham N. 2002. *Penggunaan Pangsa Pengeluaran Pangan sebagai Indikator Komposisi Ketahanan Pangan*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Situmorang BMA, Harahap A, Badruddin, dan Pohan S. 2021. Social Assistant Communication Strategy in Family Capacity Building Meeting (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)) Family Hope Program (Program Keluarga Harapan (PKH)) in Toba Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. Vol 8(5):527-539. <https://ijmmu.com/>
- Soegijoko BTS. 2005. *Keterkaitan Antar Kota dalam Suatu Sistem Perkotaan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*. URDI-YSS. Jakarta.
- Soeratno. 1996. *Ekonomi Pertanian*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Spencer HM. 1977. *Contemporary Macroeconomics*. Worth Publisher Inc: New York.
- Sugiarto. 2008. *Metode Statistika*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung
- Suharto E. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Suleman SA dan Resnawaty R. 2016. Program Keluarga Harapan (PKH) antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol. 4 (1):88-92. <http://jurnal.unpad.ac.id/>.
- Suradi, Irmayani NR, Habibullah, dkk. 2020. Changes of Poor Family Behavior Through Family Development Session. *Annual International conference on*

- Social Science and Humanities (AISOCH 2020)*. Vol. 452(22-26).  
<https://www.atlantis-press.com/>.
- Syaifullah M, Eliza, Tarumun S. 2017. Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga pada Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Pekanbaru. *JOM Faperta UR*. Vol. 4(1): 1-10. <https://media.neliti.com>.
- Syah H. 2013. Urbanisasi dan Modrenisasi (Studi tentang Perubahan Sistem Nilai Budaya Masyarakat Urban di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan). *Toleransi*. Vol. 5(1):1-12. <https://media.neliti.com>.
- Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskinan. 2018. *Materi Sosialisasi BPNT 2018*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta.
- Tjiptoherijanto P. 1999. Urbanisasi dan Perkembangan Kota di Indonesia. *Jurnal Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada*. Vol 10 (2):57-72. <https://journal.ugm.ac.id>.
- Triana RAL. 2011. *Pengaruh Kebijakan Subsidi Beras Miskin dan Bantuan Langsung Tunai terhadap Pengeluaran Telekomunikasi dan Rokok Rumah Tangga Miskin di Pulau Jawa*. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan. 2007. *Program Keluarga Harapan*. UPPKH Pusat. Jakarta.
- Yulianto. 2005. *Fenomena Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Desa Jotangan Kecamatan Bayat)*. Tesis. Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro. Semarang. (Tidak dipublikasikan).
- Waluyo DE. 2002. *Teori Ekonomi Makro Edisi Revisi*. UMM Press. Malang.
- World Bank. 2018. *Poverty Headcount Ratio at National Poverty Lines*. World Bank. World Development Indicators. <http://data.worldbank.org/>.
- Wuryandari RD. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Makanan, Pendidikan dan Kesehatan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol. 10 (1): 27-42. <https://neliti.ac.id/>.